

**URBANISASI DAN KUALITAS HIDUP DI KABUPATEN BEKASI
PADA TAHUN 1996 DAN 2006**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains

DERI PRAHAYU REUNIANDA

030406024X



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DEPARTEMEN GEOGRAFI

DEPOK

JULI 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Deri Prahayu Reunianda

NPM : 030406024X

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Deri Prahayu Reunianda
NPM : 030406024X
Program Studi : Geografi
Judul Skripsi : Urbanisasi dan Kualitas Hidup di Kabupaten Bekasi
Pada Tahun 1996 dan 2006

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Djoko Harmantyo, MS
Pembimbing 1 : Dra. M.H. Dewi Susilowati, MS
Pembimbing 2 : Hafid Setiadi, S.Si, MT
Penguji 1 : Dra. Tuty Handayani, MS
Penguji 2 : Drs. Cholifah Bahaudin, MA



.....
.....
.....
.....
.....

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 15 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan izin-Nya lah skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis ucapkan terimakasih teriring doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan kemudahan sebagai balasannya, kepada :

1. Dra. M.H. Dewi Susilowati, MS, selaku dosen pembimbing I dan Hafid Setiadi, S.Si, MT, selaku pembimbing II, yang telah membimbing, memberi arahan, kemudahan, nasihat dan motivasi kepada penulis mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Dr. Djoko Harmantyo, MS sebagai ketua sidang; Dra. Tuty Handayani, MS dan Drs. Cholifah Bahaudin, MA sebagai penguji I dan penguji II serta Drs. Hari Kartono, MS sebagai Penguji I saat seminar proposal dan draft, yang telah memberikan koreksi yang sangat berguna bagi penulis.
3. Drs. Triarko Nurlambang, MA sebagai pembimbing akademik penulis. Dra. Ratna Saraswati MS yang telah memberitahu sumber data untuk penelitian ini.
4. Bapak dan Mama yang dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga memberikan semua yang terbaik bagi penulis, terimakasih ya ma.. terimakasih ya pa..
5. Teh Dita Prayuti Saptari, kakakku yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Adik ku Dhandy Pradiba Prihantani dan keponakan ku Pusaka Zianthiza “Lala” yang telah mencerahkan hari-hari penulis dengan canda dan tawa

6. Santiko Tri Sulaksono, kasih ku sayang.. terimakasih telah memberikan banyak bantuan disaat kamu sebenarnya juga memerlukan bantuan, dan selalu bisa membuatku tersenyum saat aku bersedih.
7. Teman-teman Geografi 2004, yang selama empat tahun memberikan banyak cerita berharga kepada penulis. Asti, Evry, Pita dan Diana bersama kita menjadi pelopor “Beras cap Lima Wanita”.. cewe-cewe penghuni muge Nia, Nurul, Marwah, Cory, Eva, Novi, Adaw, Erika, Rahmah, serta teman-teman lain yang asyik dan baik hati.. Terimakasih semuanya...
8. Dosen-dosen Geografi UI lainnya, terimakasih telah memberikan ilmu geografi nya bagi penulis.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam melaksanakan penelitian maupun pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik selama penelitian maupun dalam penyusunan laporan. Oleh karena itu saya sangat menghargai masukan dan kritik yang dapat menyempurnakan laporan akhir ini. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Depok, Juli 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangandi bawah ini :

Nama : Deri Prahayu Reunianda

NPM : 030406024X

Program Studi : Geografi

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Urbanisasi dan Kualitas Hidup di Kabupaten Bekasi Pada Tahun 1996 dan 2006

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 5 Juli 2008

Yang Menyatakan



(Deri Prahayu Reunianda)

ABSTRAK

Nama : Deri Prahayu Reunianda

Program Studi : Geografi

Judul : Urbanisasi dan Kualitas Hidup di Kabupaten Bekasi Pada Tahun 1996 dan 2006

Sejak masuknya industri, Kabupaten Bekasi mengalami penurunan luas persawahan yang cukup tinggi. Penurunan luas persawahan tersebut menunjukkan terjadinya urbanisasi atau pengkotaan. Urbanisasi dapat mempengaruhi kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial urbanisasi dan kualitas hidup, serta hubungan antara kedua hal tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis spasial dengan overlay peta, sehingga dihasilkan peta Status Wilayah dan peta Klasifikasi Kualitas Hidup. Dari kedua peta tersebut diperoleh pada wilayah yang mengalami perubahan dari rural menjadi sub urban sebagian besar mengalami penurunan kualitas hidup, sedangkan pada wilayah yang mengalami perubahan dari sub urban menjadi urban sebagian besar mengalami peningkatan kualitas hidup.

Kata Kunci : Kualitas Hidup, Status Wilayah, Urbanisasi

ABSTRACT

Name : Deri Prahayu Reunianda

Study Program : Geography

Title : Urbanization and Quality of Life in Bekasi Regency 1996 and 2006

Ricefield has decrease rapidly since industrialization in Bekasi Regency. Decreasing of ricefield shows urbanization. Quality of life affected by urbanization. This research is to learn urbanization and quality of life spatial pattern, and connection between it. The analyze method used in this research is Spatial Analyze with overlay map, then produced Region Status map and Quality of Life Qualification map. The result of mentioned maps analysis is quality of life in most region which had change from rural to suburban decreases, while quality of life in most region which had change from suburban to urban increases.

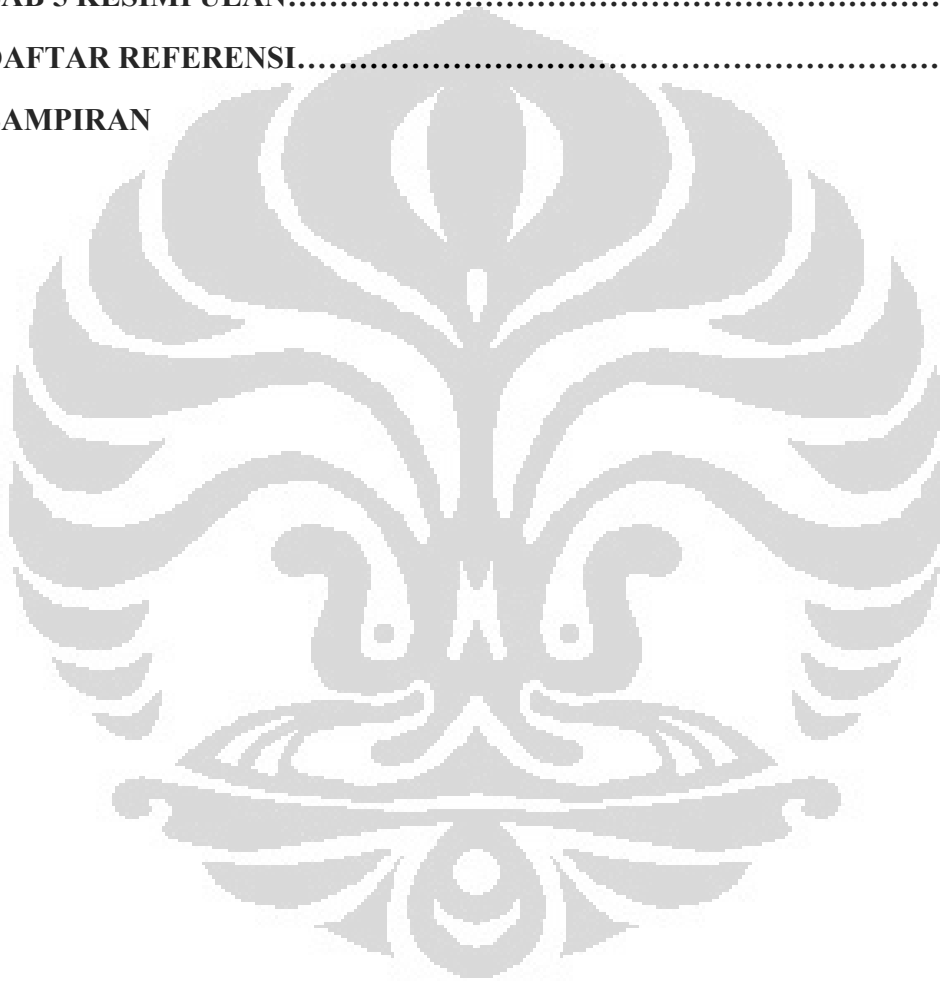
Key Word : Quality of Life, Region Status, Urbanization

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR PETA.....	xiii
DAFTAR FOTO.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah.....	2
1.2.1 Perumusan Masalah.....	2
1.2.2 Pertanyaan penelitian.....	3
1.3 Batasan dan Definisi.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Pengumpulan Data.....	5
1.4.2 Pengolahan Data.....	6
1.4.3 Analisis Data.....	8
1.5 Alur Pikir Penelitian.....	11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Urbanisasi.....	12
2.1.1 Pengertian Urbanisasi.....	12
2.1.2 Urbanisasi di Negara Berkembang.....	14
2.2 Wilayah Perkotaan (<i>Urban</i>).....	14
2.3 Wilayah Peralihan (<i>Sub Urban</i>).....	16
2.4 Wilayah Pedesaan (<i>Rural</i>).....	16
2.5 Kualitas Hidup.....	17
2.5.1 Pengertian Kualitas Hidup.....	17
2.5.2 Keluarga Pra Sejahtera.....	19
2.6 Jaringan Jalan.....	21
BAB 3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BEKASI.....	22
3.1 Administrasi.....	22
3.2 Jumlah Penduduk.....	24
3.3 Kepadatan Penduduk.....	25
3.4 Persentase Keluarga Non Agraris.....	26
3.5 Fasilitas Sosial Ekonomi.....	27
3.5.1 Fasilitas Pendidikan.....	28
3.5.2 Fasilitas Kesehatan.....	28
3.5.3 Fasilitas Ekonomi.....	29
3.6 Wilayah Terbangun.....	30
3.7 Keluarga Pra Sejahtera.....	30
3.8 Keluarga yang Tinggal di Permukiman Kumuh.....	31
3.9 Keluarga yang tidak Memiliki Telepon Kabel.....	32
3.10 Jaringan Jalan.....	32
BAB 4 URBANISASI DAN KUALITAS HIDUP DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 1996 dan 2006.....	34
4.1 Urbanisasi di Kabupaten Bekasi.....	34
4.1.1 Wilayah Urban, Sub Urban, dan Rural.....	34
4.1.2 Pola Persebaran Wilayah Urban, Sub Urban dan Rural.....	35
a. Tahun 1996.....	35
b. Tahun 2006.....	37
4.1.3 Urbanisasi.....	39
a. Wilayah Urban.....	39
b. Wilayah Sub Urban.....	42
4.2 Kualitas Hidup.....	44
4.2.1 Klasifikasi Kualitas Hidup.....	44

4.2.2	Perubahan Kualitas Hidup.....	45
a.	Kualitas Hidup Tinggi.....	47
b.	Kualitas Hidup Sedang.....	47
c.	Kualitas Hidup Rendah.....	47
4.3	Urbanisasi dan Perubahan Kualitas Hidup.....	48
BAB 5 KESIMPULAN.....		52
DAFTAR REFERENSI.....		53
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Variabel Penentu Status Wilayah.....	7
Tabel 1.2 Klasifikasi Variabel Penentu Kualitas Hidup.....	8
Tabel 1.3 Matriks Analisis Status Wilayah.....	9
Tabel 1.2 Matriks Analisis Kualitas Hidup.....	9
Tabel 3.1 Luas dan Jumlah Desa setiap Kecamatan di Kabupaten Bekasi.....	23
Tabel 3.2 Klasifikasi dan Panjang Jalan di Kabupaten Bekasi.....	32
Tabel 4.1 Jumlah Desa Berdasarkan Status Wilayah dan Jaringan Jalannya Tahun 1996.....	37
Tabel 4.2 Jumlah Desa Berdasarkan Status Wilayah dan Jaringan Jalannya Tahun 2006.....	38
Tabel 4.3 Klasifikasi Kualitas Hidup pada Tahun 1996 dan 2006.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Status Wilayah Kabupaten Bekasi.....	35
Gambar 2. Grafik Wilayah Urban terhadap Jaringan Tahun 1996 dan 2006.....	42
Gambar 3. Grafik Wilayah SubUrban terhadap Jaringan Jalan Tahun 1996 dan 2006.....	44
Gambar 4. Proporsi Kualitas Hidup Meningkat dengan Kualitas Hidup Menurun Tahun 1996 dan 2006.....	46
Gambar 5. Grafik Kualitas Hidup Tahun 1996 dan 2006.....	48
Gambar 6. Perubahan Klasifikasi Kualitas Hidup pada Desa yang Mengalami Urbanisasi Rural-Sub Urban berdasarkan Jaringan Jalan.....	50
Gambar 7. Perubahan Klasifikasi Kualitas Hidup pada Desa yang Mengalami Urbanisasi Sub Urban-Urban berdasarkan Jaringan Jalan.....	51

DAFTAR PETA

- Peta 1.** Administrasi Kabupaten Bekasi
- Peta 2.** Jaringan Jalan di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006
- Peta 3.** Jumlah Penduduk di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006
- Peta 4.** Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006
- Peta 5.** Persentase Penduduk Non Agraris di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006
- Peta 6.** Lahan Terbangun di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006
- Peta 7.** Jumlah Fasilitas Sosial Ekonomi di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006
- Peta 8.** Persentase Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006
- Peta 9.** Persentase Keluarga yang Tinggal di Permukiman Kumuh di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006
- Peta 10.** Persentase Keluarga yang Tidak Memiliki Telepon Kabel di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006
- Peta 11.** Status Wilayah di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006
- Peta 12.** Klasifikasi Kualitas Hidup di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006

DAFTAR FOTO

Foto 1. Penggunaan Tanah Persawahan di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Foto 2. Pintu Tol menuju Kota Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat

Foto 3. Ladang di Tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Foto 4. Jalan Teuku Umar, Cibitung. Salah satu jalan arteri di Kabupaten Bekasi

Foto 5. Terminal Angkutan Kota dan Pasar Cikarang Kota

Foto 6. Salah satu Perusahaan Industri di Jaringan Jalan Arteri

Foto 7. Pasar Tambun, terletak di sisi jalan arteri

Foto 8. Jalan Raya Kalimalang, Jatimulya. Salah satu jalan kolektor di Kabupaten Bekasi

Foto 9. Salah satu perusahaan industri di tepi jalan kolektor

Foto 10. Kawasan permukiman kumuh di tepi jalan kolektor

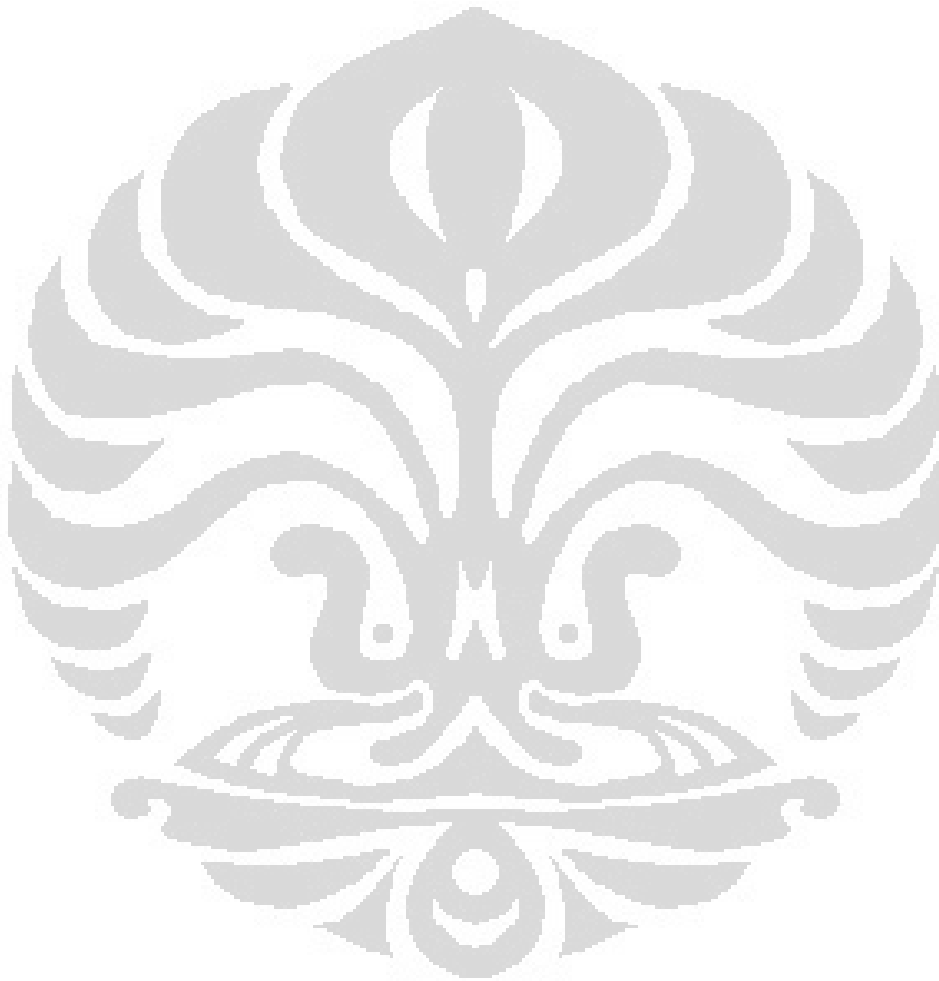
Foto 11. Salah satu Jalan Lokal di Kabupaten Bekasi

Foto 12. Ladang di tepi jalan lokal

Foto 13. Tipe permukiman di sepanjang jalan lokal

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Status Wilayah dan Klasifikasi Kualitas Hidup Tahun 1996 dan 2006



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia pada tahun 2000 telah mencapai 206.264.595 jiwa (BPS, 2000). Sedangkan berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1990 proporsi penduduk perkotaan di Indonesia telah mencapai 30.9 persen, meningkat sekitar 7 persen dari tahun 1980. Sementara itu laju kenaikan penduduk perkotaan selama periode 1970-1980 adalah 4,60 persen per tahun, sedangkan dalam periode 1980-1990 meningkat menjadi 5,36 persen per tahun. Laju kenaikan ini kira-kira dua setengah kali laju kenaikan penduduk total (Firman, 1996). Peningkatan penduduk perkotaan ini terjadi karena tiga hal, yaitu penduduk perkotaan yang beranak pinak (pertumbuhan alamiah), terjadinya migrasi dari wilayah pedesaan ke perkotaan, dan terjadinya pemekaran atau reklasifikasi wilayah pedesaan menjadi perkotaan (Chotib, 2000). Peningkatan penduduk perkotaan ini disebut sebagai urbanisasi.

Persebaran penduduk yang tidak merata ini dapat menimbulkan berbagai masalah, diantaranya: a. perataan persebaran penduduk untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersebar, b. memperbaiki lingkungan hidup dari wilayah yang sudah lama ditempati dan padat penduduknya, dan c. perataan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Bintarto, 1979).

Urbanisasi dapat berpengaruh baik atau buruk terhadap kualitas hidup penduduknya. Ketersediaan fasilitas perkotaan di wilayah yang mengalami urbanisasi dapat mendukung kebutuhan hidup penduduknya, sehingga kualitas hidup penduduknya pun akan meningkat seiring dengan proses urbanisasi. Sedangkan urbanisasi dapat mendorong penduduk untuk datang ke wilayah tersebut untuk mencari lapangan pekerjaan, sehingga jumlah penduduk dan kepadatannya akan meningkat. Kepadatan penduduk yang tinggi sedangkan kualitas lingkungan yang telah memburuk dikarenakan penggunaan tanah urban,

dapat mengakibatkan kualitas hidup penduduk yang menurun berlawanan dengan proses urbanisasi.

Urbanisasi dan kecenderungan pemusatan perkembangan kota juga terjadi di Kabupaten Bekasi. Semenjak tahun 1974 dikembangkan kebijakan perencanaan Jabotabek, dan Kabupaten Bekasi terkait di dalamnya sebagai salah satu daerah penyangga dalam sistem Metropolitan Jabotabek dan mendapat fungsi untuk pengembangan industri dan permukiman dengan tetap mempertahankan fungsi pertanian. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Bekasi 2003 - 2013, Kabupaten Bekasi memiliki wilayah-wilayah dengan spesifikasi fungsi yang berbeda. Seperti Kecamatan Cibitung dan Cikarang yang berfungsi sebagai zona dan kawasan industri. Kecamatan Sukakarya, Pebayuran dan Cabangbungin sebagai sentra produksi pertanian. Sedangkan beberapa kecamatan di sebelah Timur dan Selatan dikhususkan untuk pengembangan pembangunan permukiman.

1.2 Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga dalam sistem metropolitan Jabodetabek. Selain itu Kabupaten Bekasi memiliki fungsi sebagai kawasan pengembangan industri dan permukiman serta tetap mempertahankan fungsi pertaniannya. Fungsinya sebagai pengembang kawasan industri dan daerah penyangga metropolitan Jabodetabek tersebut memicu timbulnya gejala urbanisasi pada desa – desa di Kabupaten Bekasi. Gejala urbanisasi tersebut dapat terlihat dari luas persawahan di Kabupaten Bekasi yang terus menurun. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bekasi, luas persawahan yang semula mencapai 70.000 ha pada tahun 2001, menurun hingga 55.859 ha pada tahun 2004. Perubahan tersebut mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja bagi para penduduk yang kemudian dapat menyebabkan perubahan pada kualitas hidup penduduk. Laju urbanisasi dan perubahan kualitas hidup dapat berbeda – beda antara desa satu dengan desa lainnya.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pola spasial urbanisasi dan kualitas hidup di Kabupaten Bekasi tahun 1996 dan 2006?
2. Bagaimana hubungan urbanisasi terhadap kualitas hidup di Kabupaten Bekasi?

1.3 Batasan dan Definisi

1. Urbanisasi memiliki beberapa pengertian, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dan dapat juga diartikan sebagai pengkotaan yaitu proses menjadi wilayah perkotaan. Dalam penelitian ini, urbanisasi yang dimaksud adalah pengkotaan. Pengkotaan berarti meningkatnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan. Kemudian kota-kota itu sendiri yang tumbuh meluas, pinggiran-pinggiran yang semula pedesaan berubah menjadi perkotaan. (Daldjoeni, 1998).
2. Wilayah Perkotaan (*Urban*) merupakan suatu tipe permukiman yang secara nasional kepadatan penduduknya tinggi, struktur mata pencahariannya non-agraris, tata guna lahannya bervariasi, dan gedung – gedungnya dibangun rapat (Grinfeld, dalam Daldjoeni, 1998). Dalam penelitian ini wilayah perkotaan dinilai berdasarkan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah penduduk non – agraris dan jumlah fasilitas sosial ekonomi.
3. Wilayah Peralihan (*Sub Urban*) merupakan wilayah yang memiliki karakteristik campuran antara pedesaan dan perkotaan.
4. Wilayah Pedesaan (*Rural*) dalam arti umum adalah permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermatapencaharian agraris (Daldjoeni, 1998).
5. Kepadatan Penduduk adalah jumlah penduduk per luas wilayah (jiwa/ha).
6. Penduduk Non Pertanian adalah keluarga yang tidak satu pun anggota keluarganya melakukan kegiatan bertani/berkebun, menanam tanaman kayu – kayuan, beternak ikan di kolam, karamba maupun tambak, menjadi nelayan, melakukan perburuan atau penangkapan satwa liar,

mengusahakan ternak/unggas, atau berusaha dalam jasa pertanian (BPS, 2003).

7. Fasilitas sosial ekonomi adalah jenis fasilitas yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi penduduk. Termasuk dalam fasilitas sosial adalah fasilitas pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dan sarana pendidikan keterampilan) dan fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Tempat Praktek Dokter, Apotik dan Toko Obat). Sedangkan yang termasuk dalam fasilitas ekonomi adalah Pasar dengan Bangunan Permanen, Pasar tanpa Bangunan Permanen, Supermarket, Toko Elektronik, Pegadaian, Koperasi Unit Desa, Restoran, Warung/kedai makan-minum, Persewaan alat-alat pesta, Fotocopy, Salon Kecantikan dan Hotel.
8. Wilayah terbangun merupakan sebagian wilayah yang memiliki karakteristik penggunaan tanah perkotaan, yaitu ditandai dengan adanya permukiman dan bangunan lainnya (perkantoran, perdagangan dan industri).
9. Kualitas hidup adalah ukuran yang menggambarkan mutu dari berbagai aspek kehidupan manusia. (Rahardjo, 2006). Dalam penelitian ini kualitas hidup diukur berdasarkan aspek kesejahteraan keluarga, yaitu Jumlah persentase keluarga pra sejahtera, persentase keluarga yang tinggal di Permukiman kumuh dan persentase keluarga yang tidak memiliki telepon kabel.
10. Keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan (BKKBN, dalam Herlin 2007). Dalam penelitian ini dihitung persentase keluarga pra sejahtera terhadap jumlah keluarga seluruhnya pada suatu desa.

11. Keluarga yang bertempat tinggal di permukiman kumuh adalah persentase keluarga yang bertempat tinggal di permukiman kumuh terhadap jumlah keluarga seluruhnya pada suatu desa. Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang ditandai oleh : banyaknya rumah tidak layak huni, banyak saluran pembuangan limbah macet, penduduk/bangunan sangat padat, banyak penduduk buang air besar tidak di jamban, dan bisanya terletak di area marginal (seperti di tepi sungai, dan pinggir rel kereta api). (BPS, 2006)
12. Keluarga yang tidak memiliki telepon kabel adalah keluarga yang tidak mempunyai satu pun sambungan telepon (yang dimiliki atau dikuasai oleh pelanggan secara pribadi). Dalam penelitian ini dihitung persentase keluarga yang tidak memiliki telepon kabel terhadap jumlah keluarga seluruhnya pada suatu desa.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini dengan analisis spasial. Analisis spasial yaitu dengan menganalisis urbanisasi pada setiap Desa di Kabupaten Bekasi dan menghubungkannya dengan faktor lokasi pada tahun 1996 dan 2006. Kemudian mengkaitkan urbanisasi dengan kualitas hidup dan menjabarkannya secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data – data kuantitatif yang berasal dari Sensus Ekonomi Tahun 1996 dan 2006 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Unit analisis dalam penelitian ini adalah desa, terdiri atas 187 desa di Kabupaten Bekasi.

1.4.1 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari institusi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pengolahan data tersebut. Sesuai dengan tujuan penelitiannya, data yang dibutuhkan antara lain:

- a. Jumlah Penduduk per Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006;

- b. Jumlah Keluarga Non Agraris per Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006;
- c. Fasilitas Sosial Ekonomi per Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006, yang meliputi jumlah TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, sarana pendidikan keterampilan, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Tempat Praktek Dokter, Apotik ,Toko Obat, Pasar dengan Bangunan Permanen, Pasar tanpa Bangunan Permanen, Supermarket, Toko Elektronik, Pegadaian, Koperasi Unit Desa, Restoran, Warung/kedai makan-minum, Persewaan alat-alat pesta, Fotocopy, Salon Kecantikan dan Hotel;
- d. Luas Wilayah terbangun per Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006;
- e. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera per Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006;
- f. Jumlah Keluarga yang Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh per Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006; dan
- g. Jumlah Keluarga yang tidak Mempunyai Telepon Kabel per Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006.

Seluruh data tersebut terdapat pada “Potensi Desa” yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan peta yang dibutuhkan untuk penelitian ini, adalah :

- a. Peta Administrasi Kabupaten Bekasi, dan
- b. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006.

Seluruh peta tersebut diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional dengan skala 1 : 25.000.

1.4.2 Pengolahan Data

- a. Menghitung Kepadatan Penduduk, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (ha)}}$$

- b. Menentukan klasifikasi dari variabel penentu karakteristik urban (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, persentase keluarga non agraris, fasilitas sosial ekonomi, dan luas wilayah terbangun) dengan klasifikasi tinggi, sedang dan rendah. Kemudian membuat peta dari masing – masing variabel.

Tabel 1.1 Klasifikasi variabel penentu status wilayah

Klasifikasi	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Persentase kel Non Agraris	Wilayah terbangun	Fasilitas Sosial Ekonomi
Rendah	<5000 jiwa	<10 jiwa per ha	< 25 %	<20 %	< 50 unit
Sedang	5000-10000 jiwa	10-50 jiwa per ha	25 – 75%	20-80 %	50 – 100 unit
Tinggi	>10000 jiwa	>50 jiwa per ha	> 75%	>80 %	>100 unit

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2008

- c. Menghitung persentase Keluarga Pra Sejahtera setiap desa, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga Pra Sejahtera}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100$$

- d. Menghitung persentase Keluarga yang Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh setiap desa, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga Rumah Kumuh}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100$$

- e. Menghitung persentase Keluarga yang tidak memiliki telepon kabel, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga yang tidak memiliki telepon}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100$$

- f. Menentukan klasifikasi dari variabel penentu kualitas hidup (persentase keluarga pra sejahtera, persentase keluarga yang bertempat tinggal di permukiman kumuh, dan persentase keluarga yang tidak memiliki telepon kabel) dengan klasifikasi tinggi, sedang dan rendah. Klasifikasi dilakukan berdasarkan distribusi data pada setiap variabelnya. Kemudian membuat peta dari masing-masing variabel.

Tabel 1.2 Klasifikasi variabel penentu kualitas hidup

Klasifikasi	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga yang bertempat tinggal di permukiman kumuh	Keluarga yang tidak memiliki telepon
Rendah	< 25 %	<10%	< 30 %
Sedang	25 – 75%	10-25%	30-80%
Tinggi	> 75%	>25%	> 80%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2008

g. Melakukan pengklasifikasian desa berdasarkan lokasinya. Pengklasifikasian ini menggunakan Peta Administrasi dan Peta Jaringan Jalan Kabupaten Bekasi. Tipologi wilayah diklasifikasikan sebagai berikut:

- ❖ Desa yang dilintasi Jalan Tol;
- ❖ Desa yang dilintasi Jalan Arteri;
- ❖ Desa yang dilintasi Jalan Kolektor; dan
- ❖ Desa yang hanya dilintasi Jalan Lokal.

1.4.3 Analisis Data

Data – data yang diolah kemudian dianalisis melalui teknik Analisis Spasial, yaitu dengan :

1. Overlay peta jumlah penduduk, kepadatan penduduk, persentase keluarga non agraris, jumlah fasilitas sosial ekonomi dan persentase wilayah terbangun menjadi peta klasifikasi status wilayah tahun 1996 dan 2006, yang menghasilkan persebaran wilayah perkotaan (*Urban*), wilayah peralihan (*Sub Urban*) dan wilayah pedesaan (*Rural*).

Tabel 1.2 Matriks Analisis Status Wilayah

Variabel	Status Wilayah		
	Rural	Sub Urban	Urban
Jumlah Penduduk	Rendah	Rendah,Sedang	Tinggi
Kepadatan Penduduk	Rendah	Sedang	Tinggi
Keluarga Non Agraris	Rendah	Rendah,Sedang	Tinggi
Lahan Terbangun	Rendah	Sedang	Tinggi
Fasilitas Sosial Ekonomi	Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2008

2. Overlay peta status wilayah dengan peta jaringan jalan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan pola urbanisasi terhadap jaringan jalan di kabupaten Bekasi antara tahun 1996 dan 2006.
3. Overlay peta persentase keluarga pra sejahtera, persentase keluarga yang bertempat tinggal di permukiman kumuh, dan jumlah keluarga yang tidak mempunyai telepon menjadi peta klasifikasi kualitas hidup tahun 1996 dan 2006.

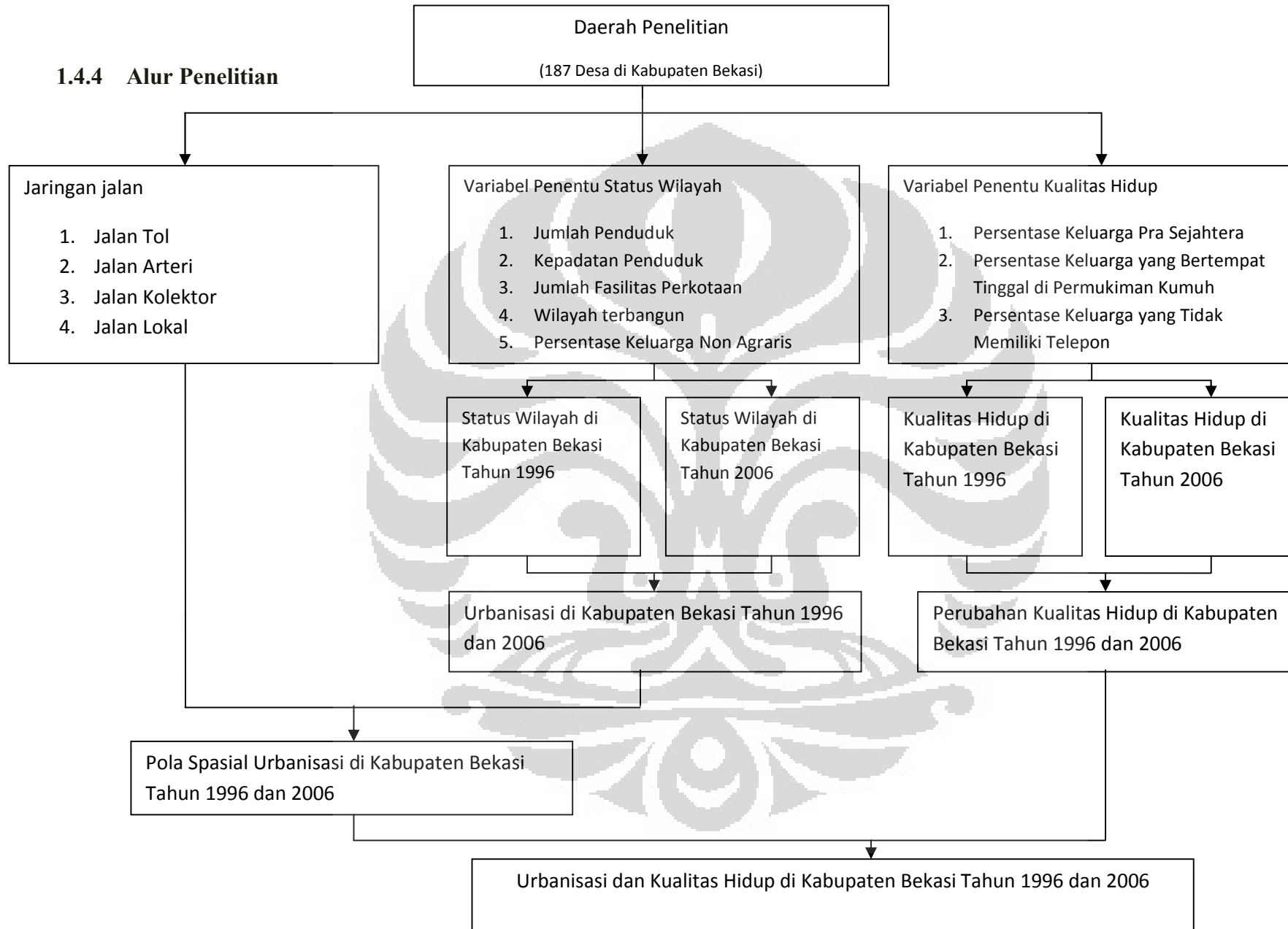
Tabel 1.2 Matriks Analisis Kualitas Hidup

Variabel	Klasifikasi Kualitas Hidup		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Keluarga Pra Sejahtera	Tinggi	Sedang	Rendah
Keluarga yang tinggal di permukiman kumuh	Tinggi	Rendah, Sedang	Rendah
Keluarga yang tidak memiliki telepon	Tinggi	Sedang	Rendah

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2008

4. Analisis deskriptif peta status wilayah dengan peta kualitas hidup Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara urbanisasi dengan perubahan kualitas hidup di Kabupaten Bekasi.

1.4.4 Alur Penelitian



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Urbanisasi

2.1.1 Pengertian Urbanisasi

Urbanisasi memiliki beberapa pengertian dari berbagai sudut pandang. Dalam ilmu demografi, urbanisasi berarti penambahan persentase jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan terhadap jumlah penduduk nasional. Sedangkan seorang geografer De Bruijne (dalam Daldjoeni 1998) menjelaskan terdapat setidaknya tujuh pengertian urbanisasi, yaitu:

1. Pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan.
2. Berpindahnya penduduk ke kota – kota dari pedesaan.
3. Bertambahnya penduduk bermatapencaharian non agraris di pedesaan.
4. Tumbuhnya suatu permukiman menjadi kota.
5. Mekarnya atau meluasnya struktur artefaktial – morfologis suatu kota di kawasan sekelilingnya.
6. Meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke pedesaan.
7. Meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan kultural kota ke pedesaan, atau meluasnya nilai – nilai dan norma – norma kekotaan ke kawasan luarnya.

Permukiman kota cenderung tumbuh terus, baik dalam hal luasnya maupun jumlahnya; bersama itu sudah semestinya bahwa proporsi penduduk dunia kita yang tinggal di kota kecil maupun kota besar meningkat. Pertambahan proporsi tersebut juga disebut sebagai urbanisasi. (Daldjoeni, 1998).

Menurut Whyne (dalam Daldjoeni, 1998) terdapat faktor –faktor yang dapat mendorong urbanisasi, yaitu:

1. Kemajuan di bidang pertanian. Adanya mekanisasi di bidang pertanian mendorong dua hal; pertama tersedotnya sebagian tenaga kerja agraris ke kota untuk menjadi buruh industri; kedua, bertambahnya hasil pertanian untuk menjamin kebutuhan penduduk yang hidupnya dari pertanian.
2. Industrialisasi. Karena industri – industri bergantung kepada bahan mentah dan sumber tenaga (misalnya batubara di abad yang lalu), maka pabrik – pabriknya didirikan di lokasi di sekitarnya; ini demi mudahnya pengelolaan. Sekaligus diperlukan tenaga buruh yang banyak, mereka bawa dan bekerja di situ; akhirnya lahir kota yang baru.
3. Potensi pasar. Berkembangnya industri ringan melahirkan kota – kota yang menawarkan diri sebagai pasaran hasil diteruskan kepada kawasan pedesaan. Kota –kota perdagangan tersebut lalu menarik pekerja – pekerja baru dari pedesaan dengan begitu kota bertambah besar.
4. Peningkatan kegiatan pelayanan. Industri tersier dan kuarter tumbuh dan meningkatkan perdagangan, taraf hidup dan memacu munculnya organisasi ekonomi dan sosial. Berbagai jenis jasa tumbuh di perkotaan; hiburan, catering, tata usaha perkantoran dan sebagainya.
5. Kemajuan transportasi. Bersama kemajuan komunikasi ini mendorong majunya mobilitas penduduk, khususnya dari pedesaan ke kota – kota di dekatnya.
6. Tarikan sosial dan kultural. Di kota banyak hal yang menarik, seperti museum, bioskop dan tempat rekreasi.
7. Kemajuan pendidikan. Tak hanya sekolah sekolah yang menarik kaum muda untuk pindah ke kota. Juga media komunikasi massal yang berpusat di kota seperti surat kabar dan siaran radio makin menyadarkan masyarakat pedesaan akan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk sukses dalam usaha.

8. Pertumbuhan penduduk alami. Di samping penduduk kota bertambah oleh masuknya urbanisasi, angka kelahiran di kota lebih tinggi dibanding pedesaan; ini akibat kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya.

2.1.2 Urbanisasi di Negara Berkembang

Menurut Pacione (2001) terdapat beberapa perbedaan antara urbanisasi yang terjadi di negara maju dan negara berkembang, yaitu :

1. Terjadi di negara-negara yang memiliki perkembangan ekonomi rendah
2. Melibatkan negara-negara yang memiliki penduduk dengan angka harapan hidup yang rendah, tingkat asupan nutrisi rendah, tingkat penggunaan energi rendah dan tingkat pendidikan rendah
3. Melibatkan lebih banyak manusia dibandingkan dengan urbanisasi yang terjadi di negara maju
4. Migrasi terjadi secara besar-besaran
5. Industrialisasi tertinggal jauh dari urbanisasi, sehingga banyak penduduk pendatang yang menjadi pengangguran di wilayah perkotaan
6. Lingkungan pada kota-kota di negara berkembang tidak sebaik pada wilayah pedesaan yang terdapat di sekitarnya
7. Wilayah kumuh dan permukiman spontan lebih mendominasi kota-kota besar di negara berkembang.

2.2 Wilayah Perkotaan (*Urban*)

Dalam memberikan definisi dari kota, para ahli mengajukan beberapa aspek yang akan mendasarinya menurut perhatian mereka masing – masing. Misalnya aspek morfologi (perbandingan bentuk fisik kota dengan fisik pedesaan), jumlah penduduk, sosial, ekonomi, dan hukum. Dari aspek morfologi suatu kota terdiri dari gedung – gedung tinggi yang saling berdekatan sedangkan di desa rumah – rumah tersebar dalam lingkungan alam wajar fisis biotis. Sedangkan jumlah penduduk mempengaruhi besar kecilnya suatu kota, semakin banyak dan padat penduduknya maka kota tersebut semakin besar.

Dalam sudut pandang geografi, Bintarto (dalam Djaljoeni,1998) mengatakan bahwa kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis. Di samping itu ia juga menulis bahwa kota dapat diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur – unsur alami dan non alami dengan gejala – gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang sifatnya heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakngnya (*Hinterland*).

Untuk mendefinisikan wilayah perkotaan, suatu negara memiliki kriteria yang berbeda – beda. Montgomery (2003) memberikan contoh perbedaan tersebut sebagai berikut; di Angola, Argentina, dan Ethiopia suatu wilayah perkotaan adalah wilayah yang dihuni oleh lebih dari 2000 penduduk sedangkan di Benin jumlah penduduk minimal suatu kota adalah 10000 jiwa. Pemerintah Botswana menetapkan kota sebagai suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5000 jiwa dan 75 persen penduduknya bermatapencaharian non agraris. Dan di Cuba, jumlah penduduk minimal suatu kota adalah 2000 jiwa, akan tetapi wilayah yang lebih kecil juga dapat memenuhi persyaratan jika mampu mengaspal jalan, memiliki lampu jalan, pipa air, saluran pembuangan, pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan.

Indonesia memiliki kriteria tersendiri untuk mendefinisikan suatu wilayah perkotaan, yaitu yang telah dilakukan oleh BPS, dengan melakukan sistem skoring dalam menentukan wilayah perkotaan. Ada tiga persyaratan suatu wilayah (lokalitas) dijadikan sebagai daerah perkotaan, yaitu:

1. Kepadatan penduduk 5000 orang atau lebih per kilometer persegi
2. Jumlah rumah tangga pertanian 25% atau lebih kecil
3. Memiliki delapan atau lebih fasilitas perkotaan. jenis fasilitas untuk menentukan kriteria adalah: Sekolah dasar sederajat, Sekolah menengah pertama dan sederajat, Sekolah menengah atas dan sederajat, Bioskop, Rumah sakit, Rumah bersalin, Puskesmas / klinik, Jalan dapat dilalui kendaraan roda empat, Telepon/kantor pos, Pasar bangunan permanen,

Pusat perbelanjaan, Bank, Pabrik, Restoran, Listrik dan Persewaan alat untuk pesta.

2.3 Wilayah Peralihan (*Sub Urban*)

Wilayah Peralihan (Sub Urban) sering didefinisikan sebagai pinggiran kota, akan tetapi lebih tepat jika wilayah peralihan merupakan wilayah dengan karakteristik antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Apabila dilihat dalam suatu lingkungan daerah maka daerah suburban merupakan daerah yang berada di antara daerah rural dan urban. Juga dilihat sebagai suatu bentuk komunitas, maka suburban merupakan komunitas yang memiliki sifat di tengah – tengah rural dan urban (Kuswitoyo, 2000).

Wilayah sub urban dalam perspektif lingkungan dikenal sebagai desa – kota (Koestoer, 2000). Wilayah desakota umumnya mengandung suatu karakteristik campuran desa dan kota. Beberapa daerah akan memperlihatkan bentuk kota dan yang lain akan lebih dekat ke arah ciri pedesaan. Pengertian dasar desakota adalah sebagai tempat bermukim masyarakat pinggir kota dan dengan demikian mencakup semua aspek interaksi, perilaku sosial, dan struktur fisik secara spasial. Di mana perkembangannya sangat bergantung pada spasial sistem yang lebih tinggi, yaitu kota. Adapun kondisinya di Indonesia, wilayah peralihan yang banyak dipengaruhi oleh pola kehidupan kota ditandai dengan pembangunan perumahan baru. Kecirian spasial wilayah ini ditandai oleh bentuk - bentuk campuran antara perumahan teratur yang dibangun oleh pengembang dan perumahan asli tradisional setempat (Kuswitoyo, 2000).

2.4 Wilayah Pedesaan (*Rural*)

Menurut Bintarto (dalam Daldjoeni, 1998), Desa dalam arti umum merupakan permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya berpangupajiwa agraris. Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga kelurahan, lalu lurah adalah kepala desa. Dengan

demikian di dalam kota – kota pun dikenal sebutan desa meskipun isinya penuh dengan pertokoan dan pasar serta deretan kios.

Tiga unsur desa:

1. Rangkah (Wilayah)
2. Darah (satu keturunan)
3. Warah (ajaran / adat)

Terdapat tiga unsur di desa-desa Jawa yaitu daerah, penduduk dan tata kehidupan. Menurut dirjen Pembangunan Desa (dalam Daldjoeni, 1998) ciri – ciri wilayah desa antara lain:

1. Perbandingan lahan dengan manusia Man – Land Ratio cukup besar; lahan di pedesaan relatif lebih luas daripada jumlah penduduk, sehingga kepadatan penduduk masih rendah
2. Lapangan kerja yang dominan agraris
3. Hubungan antar warga desa amat akrab
4. Tradisi lama masih berlaku.

2.5 Kualitas Hidup

2.5.1 Pengertian Kualitas Hidup

Berbagai kebutuhan dasar (*Basic Needs*) yang paling rendah tingkatannya seperti yang disebutkan Maslow dalam teorinya yaitu teori motivasi (*Motivation Theory*) adalah beberapa kebutuhan fisik (*Physiological Needs*), seperti kebutuhan rumah, makan, minum, pakaian, istirahat dan lain–lain. Kemudian kebutuhan pada tahap yang berikut adalah rasa aman, seperti aman dari gangguan kriminalitas, aman dari kekeringan atau aman dari kekurangan air bersih, aman dari banjir dan lain–lain. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lain yang dapat terus berkembang berkaitan dengan perilaku manusia dalam pemnafaatan SDA (Rahardjo, 2005).

Kualitas Hidup merupakan ukuran yang menggambarkan mutu dari berbagai aspek kehidupan manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhannya.

Indikator kualitas hidup terdiri atas kesehatan, kemiskinan, pendidikan, kesempatan kerja, proporsi hasil, keamanan sosial, serta tetap terpeliharanya kualitas Sumber Daya Alam (SDA) yang anekaragam dengan daya dukung dan daya tampung yang sesuai dengan tuntutan serta laju pembangunan. Tingkat kesehatan, pendidikan dan keamanan sosial mencerminkan fungsi sosial. Kemiskinan, kesempatan kerja dan proporsi hasil menggambarkan fungsi ekonomi. Fungsi ekologi dicerminkan oleh tetap terpeliharanya daya dukung dan daya tampung SDA. (Rahardjo, 2005)

Menurut Menteri Kependudukan dalam Panpan, 2002, kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik. Kondisi fisik meliputi kebugaran, yang dikaitkan dengan kesegaran jasmani, kesehatan serta daya tahan fisik sehingga dapat melakukan kegiatan yang produktif. Sedangkan non fisik meliputi kecerdasan, ketahanan mental dan kemandirian.

Erik Allardt, 1990 (dalam Panpan, 2002) membuat beberapa indikator kualitas hidup, yaitu : *Economic Resources, Income, Housing Condition, Employment, Working Condition, Health dan Education*.

Kualitas hidup dapat dihitung dan diukur secara kuantitatif. Beberapa penelitian telah menghasilkan metode untuk mengukur tingkat kualitas hidup, diantaranya adalah : *Level of Living Index (LOLI)* dan *Welfare Index (WI)* yang dikeluarkan oleh Drewnosky pada tahun 1974; *Physical Quality of Life Index (PLQI)* yang dikeluarkan oleh Morris pada tahun 1979; *Human Development Index (HDI)* yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 1990; Indeks Mutu Hidup (IMH) yang dikeluarkan oleh Bapenas pada tahun 1990; dan Indeks Perkembangan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh PPT-LIPI pada tahun 1993.

Selain dengan menggunakan metode-metode tersebut di atas, kualitas hidup dapat pula diukur dengan beragam variabel lain yang dapat mencerminkan kualitas hidup penduduknya. Dalam penelitian ini, kualitas hidup diukur melalui 3 variabel, yaitu persentase keluarga pra sejahtera, persentase keluarga yang tinggal di permukiman kumuh, dan persentase keluarga yang tidak memiliki telepon kabel. Penggunaan ketiga variabel tersebut sesuai digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas hidup di Kabupaten Bekasi, karena dapat menjelaskan kondisi kemiskinan pada tingkat keluarga di setiap desanya.

2.5.2 Keluarga Pra Sejahtera

Tingkat keluarga sejahtera dapat dibedakan menjadi lima tahapan, yaitu:

1. Keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi secara keseluruhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga dan tempat tinggal.
3. Keluarga sejahtera II yaitu keluarga disamping dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologiknya akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, olah raga, pendidikan dan sebagainya.
5. Keluarga Sejahtera III+ yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Indikator Tingkat Kesejahteraan menurut Badan Koordinasi Keluarga berencana Nasional (dalam Herlin, 2007) sebagai berikut:

Keluarga Pra sejahtera : apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih ciri-ciri atau indikator No. 1s/d 6

Keluarga Sejahtera I :

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan berpergian
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan
5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

Keluarga Sejahtera II:

7. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
8. Paling kurang sekali seminggu seluruh keluarga makan daging/ikan/telur
9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Luas lantai paling kurang $8m^2$ untuk setiap penghuni
11. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
12. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
13. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin
14. Pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi

Keluarga sejahtera III:

15. Keluarga berupaya maningkatkan pengetahuan agama
16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang
17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi

18. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
19. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv

2.6 Permukiman Kumuh

Dalam Pedoman Pencacah Survei Ekonomi, BPS mengklasifikasikan permukiman kumuh sebagai lingkungan hunian dan usaha yang ditandai oleh: banyak rumah tidak layak huni, banyak saluran pembuangan limbah macet, penduduk/bangunan sangat padat, banyak penduduk buang air besar tidak di jamban, serta biasanya berada di areal marginal. Sedangkan rumah tidak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/sampah (seperti potongan triplek, lembaran plastik sisa, dsb) yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal. Termasuk rumah gubuk.

2.7 Jaringan Jalan

Menurut UU No. 13 Tahun 1980 Pasal 14 secara garis besar dikenal tiga kelompok jalan menurut peranan atau fungsinya, yaitu :

1. Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
2. Jalan Kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan dan atau pembagian (menuju ke satu tempat dan atau keluar dari satu tempat), dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jalan masuk dibatasi.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BEKASI

3.1 Administrasi

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Barat, yang terletak pada koordinat $106^{\circ} 58' 5'' - 107^{\circ} 17' 45''$ BT dan $05^{\circ} 54' 50'' - 06^{\circ} 29' 15''$ LS. Sebelah Utara Kabupaten Bekasi berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Bekasi, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bekasi memiliki luas sebesar $1.484,37 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 187 Desa. Jumlah Desa di setiap Kecamatan berkisar antara 6 sampai 13. Kecamatan dengan jumlah Desa yang paling sedikit yaitu Kecamatan Cikarang Pusat (6 desa), Kecamatan Bojongmangu (6 desa) dan Kecamatan Muaragembong (6 desa), sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah Desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran yang terbagi atas 13 desa. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00 % dari luas kabupaten (lihat tabel 3.1).

Tabel 3.1. Luas dan Jumlah Desa setiap Kecamatan di Kabupaten Bekasi

No.	Kecamatan	Luas		Jumlah Desa
		Ha	%	
1	Setu	6.216	4,88	11
2	Serang Baru	6.380	5,01	8
3	Cikarang Pusat	4.760	4,06	6
4	Cikarang Selatan	5.174	3,74	7
5	Cibarusah	5.039	4,03	7
6	Bojongmangu	6.006	4,21	6
7	Cikarang Timur	5.131	3,40	8
8	Kedungwaringin	3.153	3,96	7
9	Cikarang Utara	4.330	4,71	11
10	Karang Bahagia	4.610	2,48	8
11	Cibitung	4.530	3,62	7
12	Cikarang Barat	4.369	3,56	11
13	Tambun Selatan	4.310	3,38	10
14	Tambun Utara	3.442	2,70	8
15	Babelan	6.360	4,99	9
16	Tarumajaya	5.463	4,29	8
17	Tambelang	3.791	5,27	7
18	Sukawangi	6.719	2,98	7
19	Sukatani	3.752	2,95	7
20	Sukakarya	4.240	3,33	7
21	Pebayuran	9.634	7,56	13
22	Cabangbungin	4.970	3,90	8
23	Muaragembong	14.009	11,00	6
Kabupaten Bekasi		127.388	100	187

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2007 (<http://www.kab-bekasi.go.id/>)

3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan suatu parameter yang dapat mengukur tingkat perkembangan suatu desa, apabila semakin meningkat jumlah penduduknya maka dapat dikatakan bahwa desa tersebut memiliki daya tarik yang tinggi. Desa yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi kemungkinan telah berubah menjadi wilayah yang bersifat Urban.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan dari tahun 1996 hingga 2006, yaitu sebanyak 736.153 jiwa yang tersebar ke seluruh Desa di Kabupaten Bekasi. Meskipun rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan, tetapi pada beberapa Desa terjadi penurunan jumlah penduduk, yaitu pada Desa Wibawamukti di Kecamatan Cibarusah, Desa Pasirranji di Kecamatan Cikarang Pusat dan Desa Danau Indah di Kecamatan Cikarang Barat. Ketiga Desa tersebut mengalami penurunan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga angka pertumbuhan penduduk pada ketiga desa tersebut menunjukkan nilai negatif.

Persebaran jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi mengalami perubahan dari tahun 1996 hingga 2006. Pada tahun 1996 jumlah penduduk terendah terdapat pada Desa Gandamekar di Kecamatan Cikarang Barat dengan jumlah penduduk 2.009 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Desa Jatimulya di Kecamatan Tambun Selatan dengan jumlah penduduk 37.301 jiwa. Pada tahun 2006 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bekasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, hampir seluruh desa mengalami peningkatan jumlah penduduk. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Desa Sukakarsa di Kecamatan Sukakarya dengan jumlah penduduk 2.287 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tertinggi terdapat pada Desa Wanasari di Kecamatan Cibitung dengan jumlah penduduk 78.986 jiwa.

Meskipun pada setiap tahunnya, desa dengan jumlah penduduk tertinggi atau terendah berbeda, berdasarkan hasil pengolahan data, jumlah penduduk tinggi memusat di bagian Barat Kabupaten, yaitu pada Kecamatan Tambun Utara, Tambun Selatan, Cibitung dan Cikarang Barat. Sedangkan jumlah penduduk

dengan klasifikasi rendah terdapat pada bagian selatan dan utara, yaitu pada Kecamatan Bojongmangu dan Muaragembong.

3.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan parameter yang dapat mengukur urbanisasi yang terjadi pada suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan dari tahun 1996 hingga 2006. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bekasi pada tahun 1996 adalah 9,74 jiwa/Ha, sedangkan pada tahun 2006 kepadatan penduduk meningkat hingga 15,52 jiwa/Ha. Peningkatan tersebut terjadi di seluruh desa di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi besar peningkatannya berbeda pada setiap desa. Desa yang mengalami peningkatan kepadatan penduduk yang tertinggi adalah Desa Cikarang Kota di Kecamatan Cikarang Utara dengan besar peningkatan 151,7 jiwa/Ha. Sedangkan desa yang mengalami peningkatan kepadatan penduduk terendah adalah Desa Pantai Harapanjaya di Kecamatan Muaragembong dengan peningkatan sebesar 1,16 jiwa/Ha.

Pada tahun 1996, kepadatan penduduk tinggi terdapat di Desa Mekarsari di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebesar 11,92 jiwa/Ha, dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Desa Pantai Bakti di Kecamatan Muaragembong, yaitu 0,16 jiwa/Ha. Sedangkan pada tahun 2006 desa yang berada pada klasifikasi kepadatan penduduk tinggi mengalami peningkatan. Meskipun begitu, kepadatan penduduk tertinggi tetap terdapat pada Desa Mekarsari di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebesar 163,05 jiwa/Ha. Dan kepadatan penduduk rendah terdapat pada Desa Pantai Harapanjaya di Kecamatan Muaragembong, yaitu 1,32 jiwa/Ha.

Persebaran kepadatan penduduk dari setiap tahunnya mengalami perubahan. Akan tetapi umumnya wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi berada pada bagian barat kabupaten, sedangkan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah berada di bagian utara dan selatan kabupaten.

3.4 Persentase Keluarga Non Agraris

Apabila suatu wilayah berkembang menjadi wilayah yang memiliki sifat urban, maka lapangan kerja yang bersifat agraris sedikit demi sedikit mengalami penurunan, selain karena penjualan lahan pertanian besar-besaran oleh para pemilik tanah, pekerjaan sebagai petani juga dinilai masyarakat tidak lebih baik bahkan ketinggalan dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lainnya. Karena itu persentase penduduk yang bermatapencaharian di luar pertanian dapat mencerminkan tingkat ke urbanan dari suatu wilayah.

Pada tahun 1950-an Kabupaten Bekasi merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Jawa, dengan luas lahan pertanian yang melimpah dan jumlah petani yang banyak. Semenjak tahun 1990-an Kabupaten Bekasi menjadi wilayah yang potensial untuk pengembangan industri. Hal tersebut yang mengakibatkan penurunan luas lahan pertanian dan lapangan kerja pertanian.

Persebaran persentase penduduk non agraris di Kabupaten Bekasi setiap tahunnya mengalami perubahan. Pada tahun 1996, persentase penduduk non agraris terendah terdapat pada Desa Karangsegar di Kecamatan Pebayuran serta Desa Ridogalih di Kecamatan Cibusah dengan hanya 3% penduduk yang bermatapencaharian di luar pertanian, dan persentase penduduk non agraris tertinggi terdapat pada beberapa Desa yang umumnya berada di bagian barat Kabupaten yaitu di Desa Setiamekar, Desa Lambangsari dan Desa Tridayasakti di Kecamatan Tambun Selatan; Desa Cikarang Kota dan Desa Karangbaru di Kecamatan Cikarang Utara; serta Desa Pasirsari di Kecamatan Cikarang Selatan; seluruh Desa dan Desa tersebut memiliki 100% penduduk yang bekerja pada sektor non agraris.

Pada tahun 2006, terjadi perubahan pada persentase penduduk non pertanian pada setiap desa. Beberapa desa mengalami penurunan nilai persentase sedangkan tidak sedikit pula yang mengamali peningkatan. Desa-desa yang mengalami penurunan antara lain Desa Sukadarma di Kecamatan Sukatani yang mengalami penurunan persentase hingga 61%. Sedangkan Desa Cibusah Jaya di Kecamatan Cibusah mengalami peningkatan hingga 85%. Persebaran persentase

penduduk non agraris pada tahun 2006 sedikit berbeda dengan tahun 1996. Di mana desa yang memiliki persentase terendah adalah Desa Ridogalih dan Ridomanah di Kecamatan Cibarusah; Desa Sukamukti dan Sukabungah di Kecamatan Bojongmangu; serta Desa Sindangjaya di Kecamatan Cabangbungin dengan hanya 10% penduduk yang bermatapencaharian di luar pertanian. Sedangkan persentase tertinggi terdapat pada Desa Sukaresmi dan Pasirsari di Kecamatan Cikarang Selatan; Desa Hargamekar, Mekarmukti, Tanjungsari, Cikarang Kota, Karangbaru, dan Karangasih di Kecamatan Cikarang Utara; serta Desa Setiadarma, Tridayasakti dan Setiamekar di Kecamatan Tambun Selatan dengan seluruh penduduk (100%) bermatapencaharian non agraris.

3.5 Fasilitas Sosial Ekonomi

Fasilitas Sosial Ekonomi merupakan salah satu daya tarik bagi suatu wilayah. Akan tetapi fasilitas sosial ekonomi juga dapat merupakan perkembangan kebudayaan manusia sebagai respon terhadap kemajuan suatu wilayah. Apabila wilayah tersebut semakin banyak memiliki fasilitas, maka penduduk yang tinggal di wilayah tersebut akan mendapatkan kemudahan dan wilayah tersebut akan memiliki daya tarik bagi wilayah lain di sekitarnya.

Kabupaten Bekasi memiliki jumlah fasilitas sosial ekonomi yang berbeda pada setiap desa dan tahunnya. Pada tahun 1996, persebaran fasilitas sosial ekonomi dengan klasifikasi tinggi hanya berada di beberapa desa dengan letak yang tersebar. Sedangkan pada tahun 2006, jumlah desa yang memiliki fasilitas dengan klasifikasi tinggi semakin banyak dan hampir merata di seluruh Kabupaten. Akan tetapi besar setiap nilai terendah dan tertinggi pada tahun 1996 berbeda dengan tahun 2006.

Pada tahun 1996, Desa Sukawangi di Kecamatan Sukawangi merupakan desa yang memiliki jumlah fasilitas sosial ekonomi terendah, yaitu hanya 10 buah fasilitas. Sedangkan desa yang memiliki jumlah fasilitas sosial ekonomi tertinggi adalah desa Jatimulya di Kecamatan Tambun Selatan, dengan jumlah fasilitas sebanyak 331 buah. Pada tahun 2006, terjadi peningkatan jumlah fasilitas di

seluruh desa. Jumlah fasilitas sosial ekonomi tertinggi terdapat pada Desa Cikarang Kota di Kecamatan Cikarang Utara dengan jumlah fasilitas 1.274 buah. Sedangkan desa yang memiliki jumlah fasilitas terendah adalah Desa Huripjaya di Kecamatan Babelan dengan jumlah fasilitas 30 buah.

3.5.1 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan diantaranya adalah jumlah TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan Sarana Pendidikan Keterampilan. Pada tahun 1996, jumlah fasilitas pendidikan tidak sebanyak pada tahun 2006. Perubahan jumlah tersebut dapat berupa pengurangan atau penambahan jumlah. Desa-desa yang mengalami penurunan jumlah fasilitas pendidikan antara lain adalah Desa Kalijaya di Kecamatan Cikarang Barat, Desa Cibusah Kota di Kecamatan Cibusah dan Desa Sukamakmur di Kecamatan Sukakarya.

Pada tahun 1996 jumlah fasilitas pendidikan terbanyak terdapat pada desa Kalijaya di Kecamatan Cikarang Barat yaitu sebanyak 51 unit. Sedangkan desa yang memiliki jumlah fasilitas pendidikan terendah terdapat pada desa Sukakarsa di Kecamatan Sukakarya dengan jumlah fasilitas pendidikan sebanyak 2 unit saja. Pada tahun 2006 jumlah tersebut mengalami perubahan. Desa yang memiliki jumlah fasilitas pendidikan tertinggi adalah Desa Wanasari di Kecamatan Cibitung dengan jumlah fasilitas pendidikan sebanyak 48 unit. Sedangkan desa yang memiliki jumlah fasilitas pendidikan terendah adalah Desa Sukakarsa di Kecamatan Sukakarya dengan jumlah 2 unit.

3.5.2 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan diantaranya adalah Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Tempat Praktek Dokter, Apotik dan Toko Obat. Dalam rentang tahun 1996 samapi dengan tahun 2006 terdapat perubahan pada jumlah fasilitas kesehatan di setiap desanya. Terdapat satu desa yang mengalami penurunan jumlah fasilitas kesehatan, yaitu Desa Sukakarya di Kecamatan Sukakarya yang mengalami penurunan jumlah fasilitas kesehatan mencapai 5 unit. Sedangkan desa-desa lainnya mengalami peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang

bervariasi antara 1 hingga 116 unit, desa yang mengalami kenaikan hingga 116 unit adalah Desa Bahagia di Kecamatan Babelan.

Pada tahun 1996, terdapat 31 desa yang belum memiliki satu pun fasilitas kesehatan, desa-desa tersebut antara lain adalah desa Karangsegar di Kecamatan Pebayuran dan Desa Cibarusahjaya di Kecamatan Cibarusah. Sedangkan yang memiliki jumlah fasilitas ekonomi tertinggi adalah Desa Mangunjaya di Kecamatan Tambun Selatan dengan jumlah fasilitas kesehatan sebanyak 20 unit. Pada tahun 2006, seluruh desa di Kabupaten Bekasi telah memiliki fasilitas kesehatan. Desa yang memiliki jumlah fasilitas kesehatan terendah adalah desa Jayasampurna dengan hanya memiliki 2 unit fasilitas kesehatan, sedangkan desa yang memiliki fasilitas kesehatan tertinggi adalah desa Bahagia yang memiliki 117 unit fasilitas kesehatan.

3.5.3 Fasilitas Ekonomi

Fasilitas ekonomi diantaranya adalah Pasar dengan bangunan permanen, pasar tanpa bangunan permanen, supermarket, toko elektronik, pegadaian, koperasi unit desa, restoran, warung/kedai makan-minum, persewaan alat-alat pesta, fotocopy, salon kecantikan dan hotel. Selama tahun 1996-2006 terdapat perubahan yang cukup tinggi. Perubahan tersebut umumnya merupakan peningkatan jumlah fasilitas ekonominya.

Pada tahun 1996, jumlah fasilitas ekonomi tertinggi terdapat di desa Jatimulya di Kecamatan Tambun Selatan dengan jumlah fasilitas ekonomi sebanyak 247 unit. Sedangkan pada tahun yang sama terdapat satu desa yang tidak memiliki fasilitas ekonomi sama sekali, desa tersebut adalah Desa Sukamaju di Kecamatan Tambelang.

Sedangkan pada tahun 2006, jumlah fasilitas ekonomi mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada setiap desanya. Desa yang memiliki fasilitas ekonomi yang paling banyak adalah Desa Cikarang Kota di Kecamatan Cikarang Utara dengan jumlah fasilitas ekonomi sebanyak 1183 unit. Sedangkan desa yang memiliki jumlah fasilitas terendah adalah desa Huripjaya di Kecamatan Babelan yaitu sebanyak 4 unit saja.

3.6 Wilayah terbangun

Salah satu ciri wilayah urban adalah tingginya persentase wilayah terbangun terhadap luas wilayah keseluruhannya. Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah terbangun yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Luas wilayah terbangun pada tahun 2006 adalah sebesar 36.810 Ha, dengan persentase terhadap luas wilayah seluruhnya sebesar 32,5%. Meningkat lebih dari 5% sejak tahun 1996, yaitu dengan luas 30.433 Ha, atau sebesar 27.7% wilayah terbangun.

Persebaran wilayah terbangun di Kabupaten Bekasi mengalami perubahan dari tahun 1996 hingga 2006. Perubahan tersebut terletak pada perluasan wilayah terbangun dan peningkatan luas wilayah pada setiap desanya. Pada tahun 1996, Desa Babelan Kota di Kecamatan Babelan memiliki persentase wilayah terbangun terendah, yaitu hanya 1% dari keseluruhan luas wilayahnya yang memiliki penggunaan wilayah terbangun. Jauh berbeda dengan Desa Babelan Kota, Desa Sukaresmi di Kecamatan Cikarang Selatan memiliki persentase wilayah terbangun sebesar 99% dari luas wilayahnya. Sedangkan pada tahun 2006, Desa Pantaibakti di Kecamatan Muaragembong dan Desa Sindangjaya di Cabangbungin memiliki persentase wilayah terbangun terendah, yaitu 2% dari luas wilayahnya masing-masing. Persentase wilayah terbangun 100% terjadi pada tahun 2006, di mana beberapa desa memiliki wilayah yang keseluruhannya adalah wilayah terbangun. Desa-desa tersebut adalah Desa Sukadanau dan Danau Indah di Kecamatan Cikarang Barat; Desa Setiadarma, Tridayasakti, dan Mangunjaya di Kecamatan Tambun Selatan; serta Desa Harjamekar dan Karangbaru di Kecamatan Cikarang Utara.

3.7 Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas hidup penduduk pada suatu desa. Parameter ini digunakan karena dapat menjelaskan adanya tingkat kemiskinan keluarga yang berbeda-beda pada setiap desa.

Pada tahun 1996, klasifikasi Keluarga Pra Sejahtera terendah berada di beberapa desa di Kecamatan Setu, yaitu Desa Ragemanunggal, Desa Cikarageman, Desa Kertarahayu, Desa Cibening, dan Desa Cileduk. Seluruh desa tersebut tidak memiliki keluarga Pra Sejahtera. Sedangkan desa yang memiliki jumlah keluarga Pra Sejahtera tertinggi adalah Desa Sukaasih di Kecamatan Sukatani yaitu sebanyak 3.227 keluarga Pra Sejahtera.

Selama 10 tahun hingga tahun 2006, jumlah keluarga Pra Sejahtera mengalami peningkatan rata-rata. Jumlah keluarga Pra Sejahtera terendah adalah sebanyak 250 keluarga yang terdapat di Desa Medalkrisna Kecamatan Bojongmangu, dan Desa Lubangbuaya di Kecamatan Setu. Sedangkan jumlah keluarga Pra Sejahtera terbanyak terdapat di Desa Wanasari Kecamatan Cibitung, yaitu sebanyak 6.923 keluarga.

3.8 Keluarga yang Tinggal di Permukiman Kumuh

Kabupaten Bekasi mempunyai beberapa wilayah yang termasuk dalam wilayah permukiman kumuh. Pada tahun 1996, jumlah desa yang memiliki kawasan permukiman kumuh hanya sebanyak 11 desa, yaitu pada Desa Sukarahayu dan Desa Sukarapih di Kecamatan Tambelang; Desa Pantaibahagia dan Desa Pantaimekar di Kecamatan Muaragembong; Desa Karangsari di Kecamatan Cikarang Timur; Desa Waringinjaya di Kecamatan Kedungwaringin; Desa Sukadharma di Kecamatan Sukatani; Desa Sukarapih di Kecamatan Tambelang; serta Desa Jatimulya di Kecamatan Tambun Selatan. Sedangkan pada tahun 2006, jumlah tersebut meningkat hingga sebanyak 37 desa yang memiliki kawasan permukiman kumuh.

3.9 Keluarga yang Tidak Mempunyai Telepon Kabel

Kepemilikan telepon kabel bukan hanya dapat mencerminkan tingkat kekayaan keluarga, tetapi juga dapat mencerminkan perhatian pemerintah terhadap suatu desa dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tahun 1996, desa-desa yang mempunyai fasilitas telepon kabel hanya sebanyak 67 desa, sedangkan pada tahun 2006 jumlah desa yang memiliki fasilitas telepon kabel meningkat hingga 142 desa.

3.10 Jaringan Jalan

Jaringan jalan di Kabupaten Bekasi terdiri dari Jalan Tol, Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal. Klasifikasi dan panjang setiap kelas jalan, dijelaskan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2 Klasifikasi dan panjang jalan di Kabupaten Bekasi

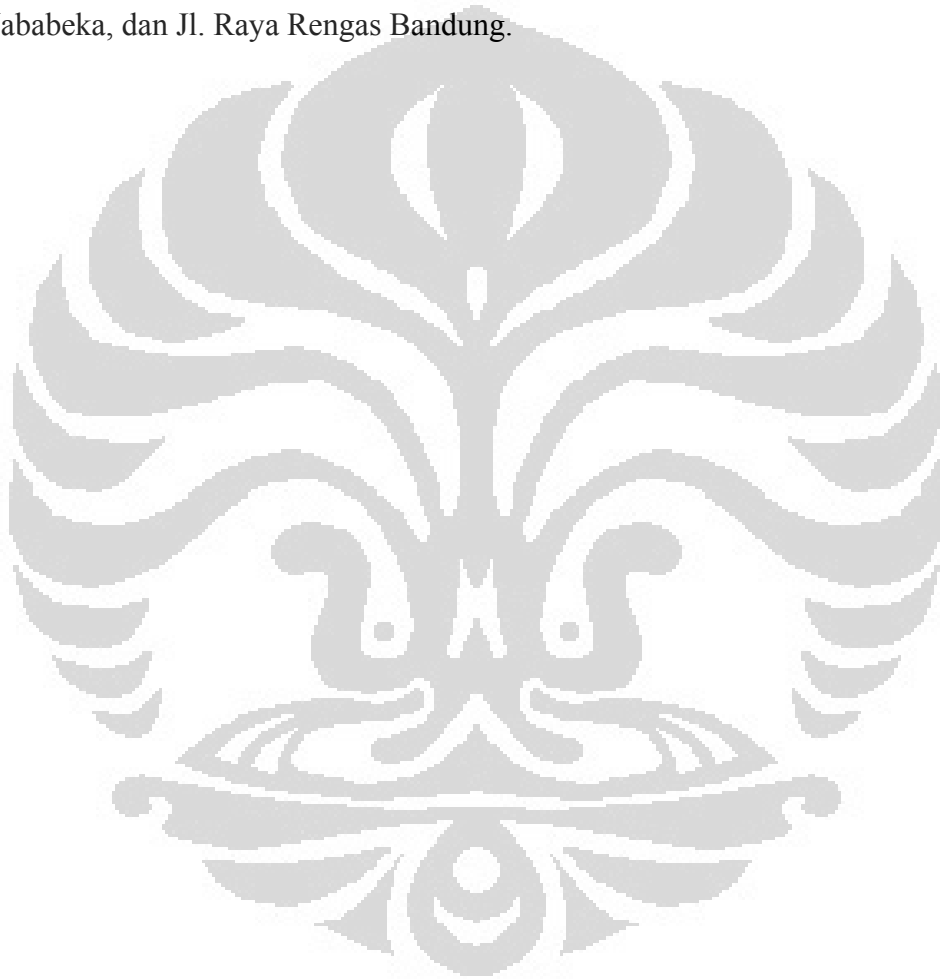
Klasifikasi Jaringan Jalan	Panjang Jalan
Jalan Tol	21.854,282 m
Jalan Arteri	37.278,973 m
Jalan Kolektor	831.121,237 m
Jalan Lokal	1.324.959,697 m

Sumber : Hasil Pengolahan data

Jalan Tol yang terdapat di Kabupaten Bekasi merupakan jalan tol Jakarta – Cikampek yang menghubungkan Propinsi DKI Jakarta dengan Cikampek. Jalan tol Jakarta Cikampek dibangun sejak tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989. Jalan tol ini melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi, yaitu :

Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Pusat, dan Kecamatan Cikarang Utara.

Jalan Arteri yang terdapat di Kabupaten Bekasi antara lain : Jl. IR.H Juanda, Jl. Sultan Hasanudin, Jl. Teuku Umar, Jl. Imam Bonjol, Jl. Fatahillah, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Yos Sudarso, Jl. RE. Martadinata, Jl. Gatot Subroto, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Lemahabang-Cibarusah, Jl. Raya Cibarusah, Jl. Industri Jababeka, dan Jl. Raya Rengas Bandung.



BAB 4

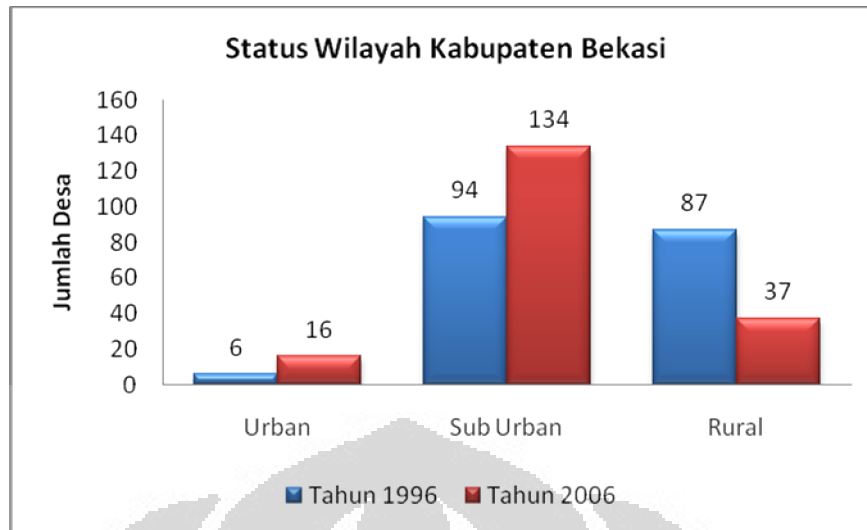
URBANISASI DAN KUALITAS HIDUP DI KABUPATEN BEKASI PADA TAHUN 1996 DAN 2006

4.1 Urbanisasi di Kabupaten Bekasi

4.1.1 Wilayah Urban, Sub Urban dan Rural

Berdasarkan hasil pengolahan data, pada tahun 1996 hingga tahun 2006, Kabupaten Bekasi mengalami perluasan wilayah urban. Pada tahun 1996 jumlah desa dengan klasifikasi urban hanya terdapat di Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cikarang Utara, yaitu pada Desa Setiadarma, Desa Mekarsari, Desa Jatimulya dan Desa Setiamekar di Kecamatan Tambun Selatan; serta Desa Cikarang Kota, dan Desa Karangasih di Kecamatan Cikarang Utara. Sedangkan pada tahun 2006, desa yang memiliki karakteristik wilayah urban bertambah menjadi lebih dari 2 kali lipatnya, yaitu 16 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Perluasan tersebut bergerak ke arah timur, yaitu pada Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Barat, dan Kecamatan Cibitung.

Wilayah Sub urban merupakan wilayah yang mendominasi klasifikasi wilayah pada setiap tahunnya. Pada tahun 1996, desa yang termasuk dalam klasifikasi sub urban sebanyak 94 desa yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Sedangkan pada tahun 2006, jumlah wilayah sub urban mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 134 desa yang memiliki klasifikasi sub urban. Diantaranya adalah wilayah rural yang berkembang menjadi wilayah sub urban. Karena itulah wilayah rural yang pada tahun 1996 sebanyak 87 desa, pada tahun 2006 hanya tinggal 37 desa saja (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Status Wilayah Kabupaten Bekasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2008

4.1.2 Pola Persebaran Wilayah Urban, Sub Urban dan Rural terhadap Jaringan Jalan

Persebaran wilayah Urban, Sub urban dan Rural memiliki pola yang mengikuti jaringan jalan. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan bahwa desa-desa yang terletak di sepanjang jalan arteri dan jalan umumnya memiliki klasifikasi urban dan sub urban. Desa-desa yang memiliki jalan tol juga pada umumnya memiliki klasifikasi urban dan sub urban. Pada jalan kolektor, perkembangan wilayah terjadi lebih cepat dibandingkan dengan jalan lokal (lihat peta 11).

a. Tahun 1996

Pada tahun 1996, terdapat 9 desa yang dilalui Jalan Tol, 21 desa yang dilintasi oleh Jalan Arteri, 96 desa yang dilintasi oleh jalan kolektor, dan 62 desa yang dilintasi hanya oleh Jalan Lokal saja.

Desa-desa yang dilintasi oleh jalan tol memiliki klasifikasi urban, sub urban dan rural. Desa yang tergolong wilayah urban hanya 1 desa saja, yaitu Desa Jatimulya di Kecamatan Tambun Selatan. Dari 9 desa yang dilintasi oleh jalan tol, terdapat 5 desa yang tergolong wilayah sub urban.

Desa-desanya tersebut adalah Desa Cibatu dan Desa Pasirsari di Kecamatan Cikarang Selatan; Desa Cibuntu di Kecamatan Cibitung; Desa Lambangsari di Kecamatan Tambun Selatan; dan Desa Wangunharja di Kecamatan Cikarang Utara. Sedangkan terdapat 3 desa yang tergolong dalam wilayah rural. Desa-desanya tersebut antara lain adalah Desa Hegarmukti dan Desa Pasirtanjung di Kecamatan Cikarang Pusat; serta Desa Danauindah di Kecamatan Cikarang Barat.

Jalan arteri yang terdapat di Kabupaten Bekasi melintasi 21 desa. Dari 21 desa tersebut terdapat 5 wilayah urban, 15 wilayah sub urban, dan 1 wilayah rural. Desa-desanya yang termasuk dalam wilayah urban adalah Desa Mekarsari, Desa Setiadarma, dan Desa Setiamekar di Kecamatan Tambun Selatan; serta Desa Cikarang Kota dan Desa Karangasih di Kecamatan Cikarang Utara. Sedangkan desa-desanya yang dilintasi jalan arteri dan memiliki klasifikasi wilayah suburban ada 15 desa yang terdapat pada beberapa kecamatan, diantaranya adalah Desa Bojongsari di Kecamatan Kedungwaringin, Desa Gandasari di Kecamatan Cikarang Barat, Desa Jatibaru di Kecamatan Cikarang Timur, Desa Tambun di Kecamatan Tambun Selatan dan Desa Simpangan di Kecamatan Cikarang Utara. Dan hanya satu desa saja yang merupakan wilayah rural, yaitu Desa Karangsari di Kecamatan Cikarang Timur.

Pada tahun 1996, jumlah desa yang dilintasi jalan kolektor terdapat 96 desa. Dari 96 desa tersebut tidak ada satu desa pun yang tergolong dalam klasifikasi wilayah urban. Sedangkan desa yang tergolong wilayah suburban sebanyak 51 desa dan yang tergolong dalam klasifikasi wilayah rural terdapat 44 desa.

Jalan lokal melalui hampir seluruh desa di Kabupaten Bekasi, akan tetapi hanya 62 desa yang dikategorikan sebagai desa yang dilalui jalan lokal. Pengkategorian tersebut berdasarkan tidak ada jaringan jalan lain selain jalan lokal yang melalui desa-desanya tersebut. Wilayah yang dilintasi oleh jalan lokal saja tidak memiliki satu pun desa yang tergolong dalam wilayah urban. Sedangkan desa yang merupakan wilayah suburban terdiri dari 23 desa, dan yang tergolong dalam wilayah rural terdapat 39 desa.

Tabel 4.1. Jumlah Desa Berdasarkan Status Wilayah dan Jaringan Jalannya Tahun 1996

Kelas Jalan	Urban	Sub Urban	Rural	Jumlah
Jalan Tol	1	5	3	9
Jalan Arteri	5	15	1	21
Jalan Kolektor	-	51	44	95
Jalan Lokal	-	23	39	62
Jumlah	6	94	87	187

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2008

b. Tahun 2006

Dalam rentang tahun 1996-2006 telah terjadi penambahan beberapa ruas jalan dan perubahan klasifikasi kelas jalan. Sehingga pada tahun 2006 terdapat perubahan proporsi desa atas jaringan jalannya. Untuk jaringan jalan tol dan arteri tidak terjadi perubahan jumlah desa. Sedangkan untuk jalan kolektor, karena pada beberapa wilayah mengalami penambahan ruas jalan dan perubahan kelas jalan, maka jumlah desa yang dilintasi oleh jalan kolektor bertambah menjadi 119 desa, dan desa-desa yang hanya dilintasi oleh jalan lokal saja mengalami pengurangan, menjadi hanya 38 desa saja.

Mengalami perkembangan, desa-desa yang dilintasi oleh jalan tol, pada tahun 2006 tidak mempunyai wilayah yang bersifat rural. Dari 9 desa yang dilintasi jalan tol, sebanyak 8 desa merupakan wilayah suburban dan 1 desa yang tergolong dalam wilayah urban. Desa-desa yang merupakan wilayah suburban adalah Desa Cibatuan dan Desa Pasirsari di Kecamatan Cikarang Selatan; Desa Hegarmukti dan Desa Pasirtanjung di Kecamatan Cikarang Pusat; Desa Cibuntu di Kecamatan Cibitung; Desa Lambangsari di Kecamatan Tambun Selatan; Desa Wangunharja di Kecamatan Cikarang Utara; serta Desa Danauindah di Kecamatan Cikarang Barat.

Sedangkan wilayah urban berada di Desa Jatimulya di Kecamatan Tambun Selatan.

Pada tahun 2006 desa-desa yang dilintasi oleh jalan arteri hanya terdiri dari wilayah suburban dan urban saja. Yaitu sebanyak 11 wilayah suburban dan 10 wilayah urban.

Jalan kolektor tepatnya melalui 119 desa yang terdapat di beberapa Kecamatan. Wilayah yang mendominasi di desa-desa yang dilalui jalan kolektor adalah wilayah sub urban. Berbeda dengan tahun 1996, pada tahun 2006 terdapat 5 desa yang termasuk ke dalam klasifikasi wilayah urban, yaitu Desa Mangunjaya, Desa Sumberjaya, dan Desa Tridayasakti di Kecamatan Tambun Selatan; Desa Karangsatrria di Kecamatan Tambun Utara; serta Desa Wanasari di Kecamatan Cibitung. Dan wilayah sub urban meningkat menjadi 95 desa. Sedangkan wilayah rural menurun hingga hanya tinggal 19 desa saja.

Desa-desa yang hanya dilintasi oleh jalan lokal saja terdapat sebanyak 38 desa. Desa-desa tersebut terdiri dari 20 wilayah suburban dan 18 wilayah rural.

Tabel 4.2. Jumlah Desa Berdasarkan Status Wilayah dan Jaringan Jalannya Tahun 2006

Kelas Jalan	Urban	Sub Urban	Rural	Jumlah
Jalan Tol	1	8	-	9
Jalan Arteri	10	11	-	21
Jalan Kolektor	5	95	19	119
Jalan Lokal	-	20	18	38
Jumlah	16	134	37	187

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2008

1.1.3 Urbanisasi

Menurut Whyne (dalam Daldjoeni, 1998) urbanisasi dapat terjadi karena terdapat faktor-faktor yang mendorongnya. Faktor-faktor tersebut adalah kemajuan di bidang pertanian, industrialisasi, potensi pasar, peningkatan kegiatan pelayanan, kemajuan transportasi, tarikan sosial, kemajuan pendidikan dan pertumbuhan penduduk alami. Dalam penelitian ini, urbanisasi umumnya terjadi karena adanya industrialisasi pada beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi. Wilayah yang memiliki kawasan industri kemudian mempengaruhi wilayah lain di sekitarnya, diantaranya dalam hal penyediaan tenaga kerja, penyediaan permukiman dan perluasan wilayah industri.

Selain dikarenakan adanya industrialisasi, urbanisasi di Kabupaten Bekasi juga terjadi karena meningkatnya pembangunan permukiman pengembang kelas menengah hingga mewah. Kabupaten Bekasi memang merupakan wilayah penyangga dalam sistem Jabotabek, yang mempunyai fungsi untuk pengembangan industri dan permukiman. Pembangunan permukiman dapat mendorong terjadinya urbanisasi dikarenakan dengan pembangunan permukiman tersebut maka akan bermunculan berbagai fasilitas-fasilitas sosial dan ekonomi yang dapat melayani para penduduk.

Dalam penelitian ini, urbanisasi juga dilihat berdasarkan lokasi kejadiannya, yaitu berdasarkan jaringan jalannya. Klasifikasi jaringan jalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal. Penggunaan klasifikasi tersebut dikarenakan adanya perbedaan spesifikasi dan fungsi. Karena terdapat perbedaan fungsi tersebutlah maka setiap wilayah pada jaringan jalan tertentu akan mengalami perkembangan wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya.

a. Wilayah Urban

Wilayah urban terdapat hanya pada jaringan jalan tertentu saja, yaitu pada jalan tol, jalan arteri dan jalan kolektor.

Meskipun umumnya wilayah urban di Kabupaten Bekasi mengalami perluasan, tetapi wilayah urban yang dilalui jalan tol tidak

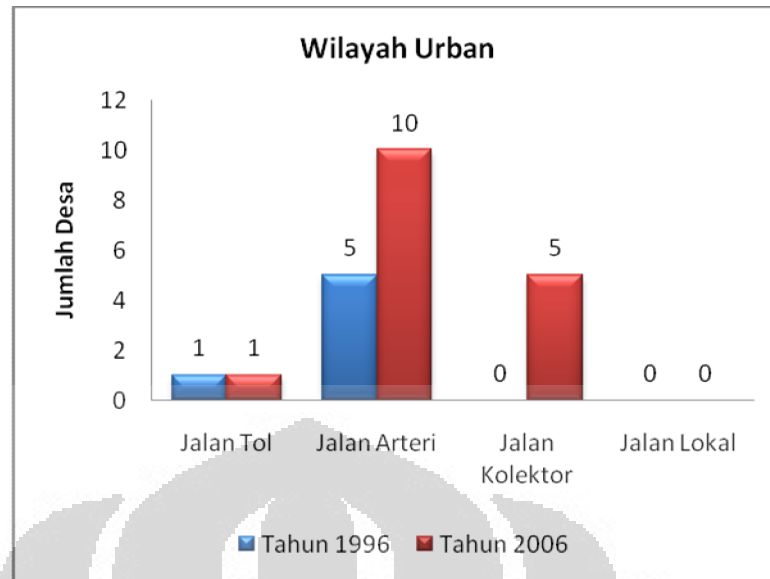
mengalami perluasan. Hal tersebut dikarenakan jaringan jalan tol memiliki kekurangan yaitu jalan masuk dan penggunaan tanah di sepanjang jalan tol yang sangat dibatasi dan dinilai kurang optimal karena tidak dapat langsung mengakses jalan tersebut, melainkan harus memutar hingga pintu tol. Sehingga dalam kegiatan industri, penggunaan jalan tol pada umumnya hanya sebagai jalur distribusi barang jarak jauh. Terdapat hanya satu desa saja yang tergolong dalam wilayah urban, yaitu pada Desa Jatimulya di Kecamatan Tambun Selatan. Desa ini merupakan desa yang padat akan kegiatan industri, baik kawasan industri atau pabrik-pabrik industri yang berdiri sendiri. Kawasan industri yang terdapat di Desa Jatimulya adalah Kawasan Berikat Tong Yang Indonesia. Kawasan ini terdiri dari beberapa industri tingkat besar hingga menengah. Industri yang terdapat di Kawasan ini antara lain adalah PT. Indomobil Suzuki Internasional, PT. Indomobil Mazda dan PT. Intermitra. Perusahaan-perusahaan industri tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang tertarik untuk mencari pekerjaan di Desa Jatimulya. Kepadatan penduduk tinggi yang disebabkan oleh buruh-buruh industri ini terus meningkat sejak tahun 1996 hingga tahun 2006.

Berbeda dengan wilayah urban yang dilintasi oleh jalan tol, wilayah urban yang dilintasi oleh jalan arteri mengalami perluasan lebih cepat. Perluasan tersebut berlangsung di sekitar desa-desa yang pada tahun 1996 sudah merupakan wilayah urban. Berdasarkan UU No.13 Tahun 1980 pasal 14, jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi. Dengan sifat jalan yang lebih terbuka tersebut, maka wilayah sub urban yang dilintasi jalan arteri lebih cepat mengalami pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan wilayah yang dilintasi jalan tol. Jalan arteri juga sangat sesuai untuk perkembangan wilayah permukiman atau kawasan industri. Salah satu contoh desa yang merupakan perluasan wilayah urban pada jalan arteri adalah Desa Tridayasakti di Kecamatan Tambun Selatan. Desa ini terdapat di sebelah timur dari Desa Mekarsari, yang semenjak tahun 1996 sudah merupakan wilayah urban. Perluasan wilayah urban tersebut disebabkan semakin

bertambah luasnya wilayah permukiman pengembang di Desa Mekarsari, sehingga pada tahun 2006, beberapa desa di sekitarnya termasuk Desa Tridayasakti mulai menarik perhatian investor untuk mengembangkan permukiman di desa tersebut. Salah satu permukiman pengembang yang terdapat di Desa Tridayasakti adalah Perumahan Puri Cendana, yang merupakan perluasan dari perumahan yang sama di Desa Mekarsari.

Pada tahun 1996 tidak terdapat wilayah urban pada sepanjang jalan kolektor. Kemudian pada tahun 2006, di sepanjang jalan kolektor terdapat beberapa wilayah sub urban yang meningkat menjadi wilayah urban. Perluasan tersebut terjadi pada bagian Barat Kabupaten Bekasi dan mengarah ke utara. Terdapat sebanyak 5 desa yang mengalami perubahan status dari sub urban menjadi wilayah urban. Perluasan wilayah urban pada sepanjang jalan kolektor tergolong cepat. Hal tersebut dikarenakan pada jalan kolektor sangat mudah terjadi perkembangan kegiatan perekonomian. Banyaknya kegiatan perekonomian akan menjadi daya tarik bagi para penduduk untuk bermukim di sekitar jalan kolektor. Unsur tersebut juga ditangkap oleh para pengembang perumahan yang kemudian merespon tumbuhnya permintaan perumahan di sekitar jalan kolektor dengan membangun berbagai tipe perumahan. Pembangunan perumahan tersebut dapat memicu perubahan status wilayah. Salah satu contoh desa yang termasuk dalam kategori tersebut adalah Desa Karangsatria di Kecamatan Tambun Utara. Desa ini terletak di sebelah utara Desa Setiamekar yang pada mulanya sudah merupakan wilayah urban. Desa Karangsatria terdiri dari beberapa permukiman mewah, diantaranya adalah Villa Mutiara Gading dan Taman Alamanda.

Sedangkan pada jalan lokal tidak terdapat wilayah urban, baik pada tahun 1996 maupun pada tahun 2006.



Gambar 2. Wilayah Urban terhadap Jaringan Jalan Tahun 1996 dan 2006

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2008

b. Wilayah Sub Urban

Wilayah sub urban yang dilintasi jalan tol mengalami perluasan wilayah. Perluasan yang terjadi adalah ke arah Timur. beberapa desa mengalami perubahan status dari rural menjadi sub urban. Salah satunya adalah Desa Danau Indah di Kecamatan Cikarang Barat. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki kawasan industri MM2100. Kawasan industri MM2100 merupakan kawasan industri terbesar yang terdapat di Kabupaten Bekasi. Menurut Whyne (dalam Daldjoeni 1998), salah satu faktor yang dapat mendorong urbanisasi adalah dengan industrialisasi. Hal tersebut terjadi pada desa ini, yang setelah memiliki kawasan industri status wilayahnya meningkat atau mengalami urbanisasi. Dengan berbagai perusahaan industri kelas menengah hingga tinggi, kawasan industri MM2100 memikat banyak calon tenaga kerja. Sejak kawasan industri ini dibangun pada tahun 1998, Desa Danau Indah mulai

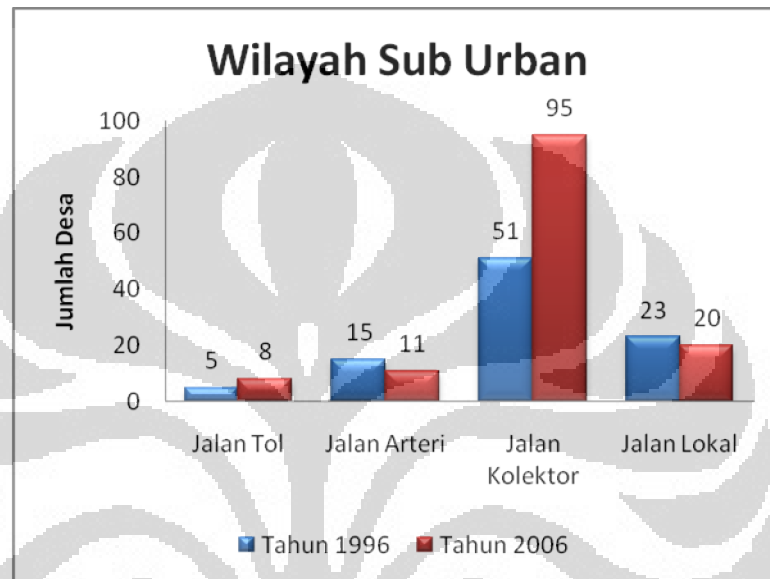
berkembang. Dan pada tahun 2006 desa ini telah mengubah status wilayahnya menjadi wilayah sub urban.

Berlawanan dengan wilayah sub urban yang terdapat di sepanjang jalan tol, pada wilayah sub urban yang dilintasi jalan arteri, terjadi penyempitan luas wilayah. Hal tersebut diakibatkan beberapa wilayah sub urban yang kemudian meningkat menjadi wilayah urban pada tahun 2006.

Wilayah sub urban yang dilintasi jalan kolektor lebih cepat mengalami perluasan dibandingkan dengan klasifikasi yang lainnya. Perluasan tersebut terjadi hingga mencapai 86% dari luas sebelumnya. Kemudahan perluasan tersebut disebabkan karena sifat jalan kolektor yang lebih terbuka, dengan fungsi melayani transportasi jarak dekat hingga menengah, jalan kolektor sangat tepat untuk dijadikan lokasi berbagai kegiatan perekonomian maupun industri. Perluasan tersebut juga terjadi karena meningkatnya minat pelaku industri untuk membangun perusahaannya pada sepanjang jalan kolektor. Pertimbangannya adalah pada tipe jalan kolektor, perusahaan mereka akan lebih mudah dijangkau oleh para tenaga kerjanya, dan pelaku industri akan memilih lokasi industri berdasarkan biaya transportasi dan tenaga kerja. Salah satu desa yang mengalami perubahan status wilayah dari rural menjadi wilayah sub urban adalah Desa Setiamulya di Kecamatan Tarumajaya. Desa yang terletak di bagian Barat Kabupaten Bekasi ini mengalami perkembangan status dari wilayah rural menjadi wilayah sub urban. Wilayah sub urban di bagian barat meluas setelah pada tahun 1996 beberapa desa di sebelah timurnya termasuk dalam klasifikasi wilayah sub urban. Selain perkembangan ke arah Barat, wilayah sub urban juga meluas ke arah utara dan timur.

Wilayah sub urban yang hanya dilintasi oleh jalan lokal mengalami penurunan luas. Hal tersebut dikarenakan pada beberapa jalan lokal yang beralih menjadi jalan kolektor pada tahun 2006. Perubahan tersebut berdampak terhadap klasifikasi dan perkembangan wilayah. Sebagai contoh adalah pada Desa Sukawijaya di Kecamatan Tambelang. Pada

tahun 1996 desa ini hanya dilintasi oleh jalan lokal saja, tetapi pada tahun 2006 terjadi penambahan klasifikasi jalan dengan jalan kolektor. Dengan adanya jalan kolektor di desa ini, maka perubahan status wilayah menjadi semakin cepat. Sedangkan pada wilayah yang tidak mengalami peningkatan status umumnya terdapat pada bagian timur dan selatan Kabupaten Bekasi.



Gambar 3. Grafik Wilayah Sub Urban terhadap Jaringan Jalan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2008

4.2 Kualitas Hidup di Kabupaten Bekasi

4.2.1 Klasifikasi Kualitas Hidup

Kualitas hidup dalam penelitian ini dinilai berdasarkan persentase keluarga pra sejahtera, persentase keluarga yang bertempat tinggal di permukiman kumuh, dan persentase keluarga yang memiliki telepon kabel. Ketiga variabel tersebut dibagi ke dalam 3 klasifikasi, yaitu klasifikasi rendah, sedang dan tinggi. Dengan teknik overlay didapatkan klasifikasi kualitas hidup rendah, sedang dan tinggi (lihat peta 12).

Pada tahun 1996, hanya terdapat 1 desa yang memiliki kualitas hidup tinggi. Desa tersebut adalah Desa Setimekar di Kecamatan Tambun Selatan. Kualitas hidup sedang mendominasi pembagian wilayah di Kabupaten Bekasi pada tahun 1996, sebanyak 135 desa memiliki kualitas hidup sedang. Diantaranya adalah Desa Telagaasih di Kecamatan Cikarang Barat dan Desa Wanasari di Kecamatan Cibitung. Sedangkan terdapat 51 desa yang memiliki kualitas hidup rendah. Desa-desa tersebut terdapat pada beberapa kecamatan yang menyebar di seluruh bagian Kabupaten Bekasi.

Pada tahun 2006, kualitas hidup pada beberapa desa mengalami peningkatan. Klasifikasi kualitas hidup tinggi terdapat pada 13 desa. Desa-desa tersebut adalah Desa Sumberjaya, Desa Tambun, Desa Mangunjaya, Desa Tridayasakti, Desa Setiamekar dan Desa Jatimulya di Kecamatan Tambun Selatan; Desa Babelan Kota, Desa Kebalen dan Desa Bahagia di Kecamatan Babelan; Desa Cibuntu di Kecamatan Cibitung; Desa Karangasih di Kecamatan Cikarang Utara; Desa Setiaasih di Kecamatan Tarumajaya; serta Desa Sukasari di Kecamatan Serang Baru. Sedangkan kualitas hidup sedang terdapat pada 104 desa, dan kualitas hidup rendah meningkat menjadi 70 desa.

Tabel 4.3. Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi Kualitas Hidupnya pada Tahun 1996 dan 2006

Klasifikasi Kualitas Hidup	Tahun 1996	Tahun 2006
Tinggi	1	13
Sedang	135	104
Rendah	51	70

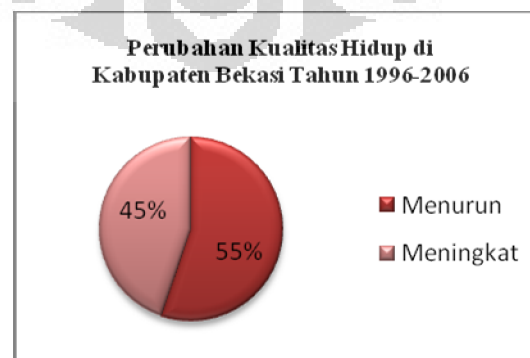
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2008

4.2.2 Perubahan Kualitas Hidup

Dalam penelitian ini kualitas hidup diukur berdasarkan persentase keluarga pra sejahtera, persentase keluarga yang bermukim di permukiman kumuh dan persentase keluarga yang tidak mempunyai telepon kabel. Perubahan kualitas hidup dapat meningkat ataupun menurun. Peningkatan kualitas hidup terjadi pada 45% desa yang terdapat di Kabupaten Bekasi, sedangkan penurunan kualitas hidup terjadi pada lebih banyak desa, yaitu sebanyak 55%. Perubahan tersebut disebabkan oleh kondisi wilayah masing-masing.

Perubahan kualitas hidup di Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh adanya atau tidaknya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bekasi diantaranya antara lain adalah meningkatnya jumlah industri dan meluasnya permukiman pengembang. Wilayah yang memiliki kawasan industri akan memiliki kualitas hidup penduduk yang berbeda dengan wilayah yang hanya terdiri dari beberapa permukiman mewah. Pada wilayah yang memiliki kawasan industri maka akan bermunculan kawasan permukiman kumuh yang dihuni oleh para pekerja yang berasal dari luar desa. Sedangkan pada wilayah yang hanya terdiri dari permukiman mewah, kualitas hidupnya cenderung lebih tinggi karena mayoritas penduduk yang bertempat tinggal di permukiman mewah adalah penduduk yang berpenghasilan tinggi sehingga jauh dari kemiskinan.

Selain itu, mata pencaharian mayoritas penduduknya juga turut mempengaruhi kualitas hidup, karena berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kemudian berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan keluarganya.



Gambar 4. Proporsi Kualitas Hidup Meningkat dengan Kualitas Hidup Menurun Tahun 1996 dan 2006

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2008

a. Kualitas Hidup Tinggi

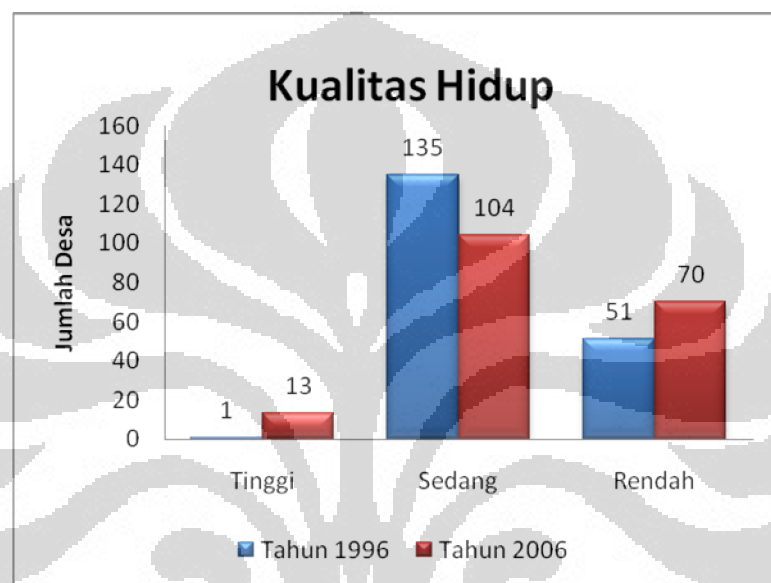
Pada tahun 1996 hanya terdapat 1 wilayah dengan kualitas hidup tinggi, yaitu pada Desa Setiamekar di Kecamatan Tambun Selatan. Desa ini terletak di bagian barat, tepat di perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi. Sedangkan pada tahun 2006 terjadi perluasan wilayah yang memiliki kualitas hidup tinggi. Perluasan tersebut mengarah ke timur dan utara dari Desa Setiamekar. Pada umumnya wilayah dengan kualitas hidup tinggi memiliki sedikit industri dan lebih banyak permukiman mewah. Desa Setiamekar sejak tahun 1996 telah merupakan desa yang memiliki beberapa permukiman mewah, sedangkan pembangunan permukiman mewah pada wilayah di sekitarnya baru terjadi sekitar tahun 2000-an. Banyaknya permukiman mewah pada suatu desa turut memberikan pengaruh terhadap kualitas hidupnya. Karena keluarga yang mampu tinggal di permukiman mewah merupakan keluarga kelas atas yang jauh dari kemiskinan.

b. Kualitas Hidup Sedang

Klasifikasi kualitas hidup sedang merupakan klasifikasi kualitas hidup mayoritas di Kabupaten Bekasi, baik pada tahun 1996 maupun tahun 2006. Pada tahun 1996 wilayah kualitas hidup sedang lebih luas dibandingkan dengan pada tahun 2006, yaitu hampir setiap kecamatan memiliki kualitas hidup sedang. Sedangkan pada tahun 2006, luas wilayah kualitas hidup sedang menurun. Penurunan tersebut karena beberapa desa mengalami penurunan kualitas hidup, menjadi kualitas hidup rendah. Desa-desa yang mengalami penurunan tersebut berurutan terjadi pada bagian timur laut hingga ke pusat Kabupaten Bekasi. Sehingga pada Kecamatan Sukatani, Tambelang, dan Sukakarya seluruh desanya memiliki kualitas hidup rendah.

c. Kualitas Hidup Rendah

Seiring dengan penurunan luas wilayah kualitas hidup sedang, maka wilayah kualitas hidup rendah mengalami perluasan dari tahun 1996 hingga 2006. Perluasan tersebut terjadi pada desa-desa di sebelah timur Kabupaten Bekasi. Desa-desa yang terletak di bagian timur Bekasi tersebut umumnya merupakan wilayah yang bersifat sub urban atau rural.



Gambar 5. Grafik Kualitas Hidup Tahun 1996 dan 2006

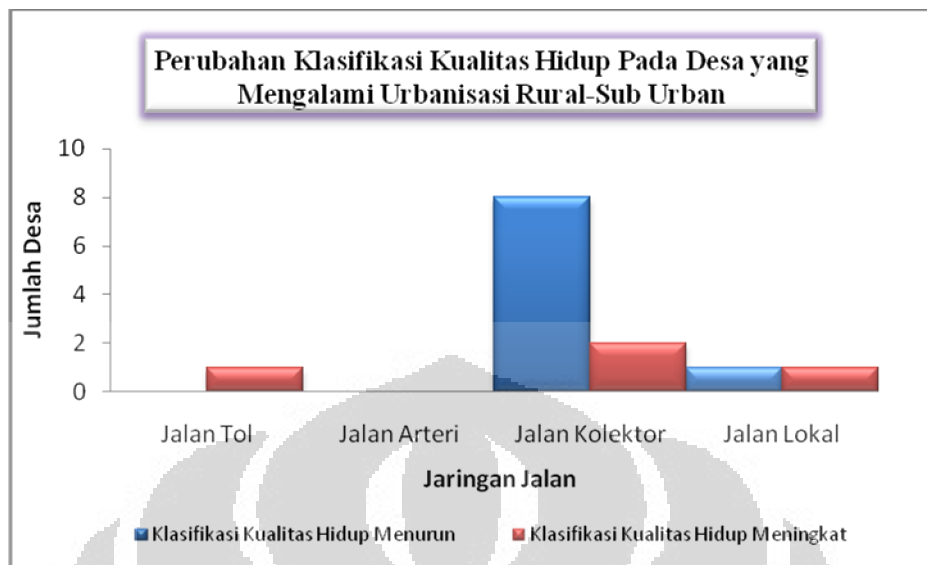
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2008

4.3 Urbanisasi dan Perubahan Kualitas Hidup

Menurut Rahardjo (2005), kualitas hidup merupakan ukuran yang menggambarkan mutu dari berbagai aspek kehidupan manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Indikator kualitas hidup terdiri atas kesehatan, kemiskinan, pendidikan, kesempatan kerja, proporsi hasil, keamanan sosial, serta tetap terpeliharanya kualitas Sumber Daya Alam (SDA) yang anekaragam dengan daya dukung dan daya tampung yang sesuai dengan tuntutan serta laju

pembangunan. Kualitas hidup dapat berubah seiring atau berlawanan dengan laju pembangunan. Pada wilayah dan kondisi yang berbeda-beda menyebabkan perubahan kualitas hidup yang berbeda-beda pula.

Wilayah yang mengalami penurunan kualitas hidup terjadi pada wilayah rural yang berubah menjadi wilayah sub urban dan berada pada jaringan jalan kolektor dan jalan lokal. Sebanyak 69% desa yang mengalami perubahan status dari rural menjadi sub urban dan mengalami penurunan kualitas hidup penduduknya. Penurunan kualitas hidup tersebut terjadi pada desa-desa yang terletak pada jaringan jalan kolektor dan lokal serta berbasis pada kegiatan pertanian, yaitu seperti pada Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Pebayuran. Penurunan tersebut terjadi karena penduduk asli yang merupakan para petani tidak mampu beradaptasi dengan pertumbuhan wilayah yang dialami oleh desa mereka. Dalam pertumbuhannya menjadi wilayah sub urban, desa-desa ini mengalami penurunan lahan pertanian besar-besaran, banyak warga yang tertarik menjual lahan pertaniannya untuk diubah menjadi wilayah terbangun, baik untuk kawasan permukiman atau untuk lokasi industri. Akan tetapi penjualan lahan tersebut tidak ditambah dengan peningkatan keahlian mereka, dengan keahlian yang minimal tersebut, para penduduk asli tidak mampu bersaing dengan para pekerja pendatang. Sehingga mereka mudah tersingkir dalam persaingan pencarian pekerjaan dan akan menambah peningkatan jumlah pengangguran.



Gambar 6. Perubahan Klasifikasi Kualitas Hidup pada Desa yang Mengalami Urbanisasi Rural-Sub Urban berdasarkan Jaringan Jalan

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2008

Peningkatan kualitas hidup terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi. Peningkatan tersebut sebagian besar terjadi pada bagian Barat Kabupaten Bekasi, tepatnya pada wilayah yang juga mengalami perubahan status dari sub urban menjadi urban; serta pada beberapa desa di bagian Timur Kabupaten Bekasi yang merupakan desa yang mengalami perubahan status wilayah rural menjadi sub urban.

Peningkatan kualitas hidup yang terdapat pada desa dengan perubahan status wilayah sub urban menjadi urban, terjadi pada desa-desa yang terletak pada jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal. Sedangkan pada desa –desa yang mengalami perubahan status dari rural-sub urban, peningkatan kualitas hidup terjadi pada beberapa desa yang dilintasi oleh jalan tol, kolektor dan lokal. Dari seluruh jaringan jalan yang ada, peningkatan kualitas hidup lebih banyak terjadi pada jalan kolektor.

Peningkatan kualitas hidup tersebut terjadi seiring dengan peningkatan fasilitas perkotaannya. Wilayah yang termasuk dalam kategori ini umumnya mengalami industrialisasi. Wilayah yang mengalami industrialisasi akan mampu meningkatkan pertumbuhannya ekonominya, sehingga wilayah ini dapat mendukung kebutuhan penduduknya, seperti dalam hal penyediaan fasilitas, infrastruktur dan lapangan pekerjaan yang memadai.



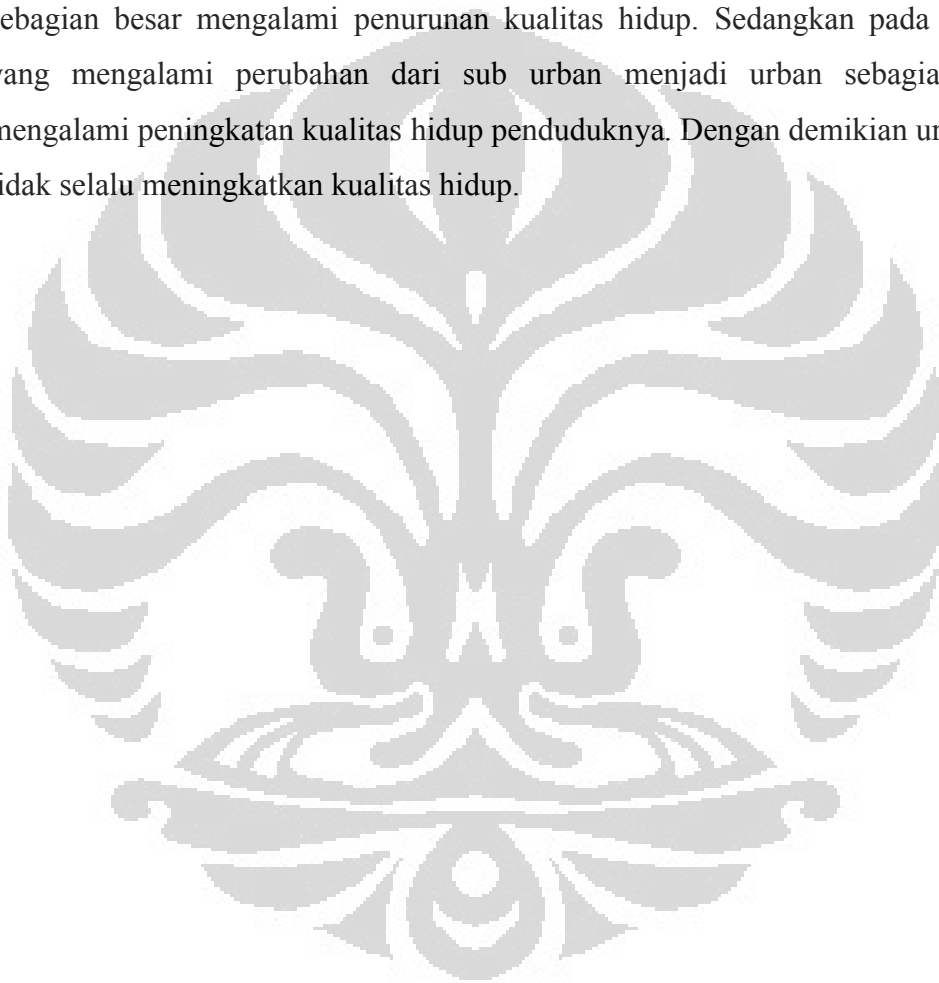
Gambar 7. Perubahan Klasifikasi Kualitas Hidup pada Desa yang Mengalami Urbanisasi Sub Urban-Urban berdasarkan Jaringan Jalan

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2008

BAB 5

KESIMPULAN

Selama rentang tahun 1996 hingga 2006, Kabupaten Bekasi mengalami urbanisasi. Urbanisasi yang terjadi mengakibatkan berubahnya kualitas hidup penduduk. Wilayah yang mengalami perubahan dari rural menjadi sub urban sebagian besar mengalami penurunan kualitas hidup. Sedangkan pada wilayah yang mengalami perubahan dari sub urban menjadi urban sebagian besar mengalami peningkatan kualitas hidup penduduknya. Dengan demikian urbanisasi tidak selalu meningkatkan kualitas hidup.



DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2003). *Statistik Potensi Desa Propinsi Jawa Barat Tahun 2003*. Jakarta.
- Bintarto, R. (1979). *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES.
- Chotib. (2000). Desentralisasi Urbanisasi dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Warta Demografi Tahun. 30 No. 3, Hal. 7 – 13*
- Daldjoeni, N. (1998). *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: PT. Alumni.
- Darrundono. (1998). *Pengaruh Pertambahan Penduduk terhadap Kualitas Hidup, Studi Kasus : Kampung – Kampung yang sudah diperbaiki melalui Proyek MHT di Jakarta*. Tesis Pascasarjana Ilmu Lingkungan – Ekologi Manusia Universitas Indonesia. Jakarta
- Fadjri, Panpan. (2002). *Analisa Indikator Kualitas Hidup Penduduk Indonesia menurut Kabupaten/Kotamadya*. Depok: Lembaga Demografi FE Universitas Indonesia.
- Herlin, Sri. (2007). *Wilayah Keluarga Pra Sejahtera di Kota Depok*. Skripsi Jurusan Geografi FMIPA UI. Depok.
- Koestoer, Raldi Hendro *et all.* (2001). *Dimensi Keruangan Kota, Teori dan Kasus*. Jakarta: UI Press.
- Kurniawan, Agung. (1994). *Kualitas Hidup Fisik di Propinsi Jawa Barat*. Skripsi Jurusan Geografi FMIPA UI. Depok.
- Kuswitoyo. (2001). *Wilayah Urban di Kota Bekasi Tahun 2000*. Skripsi Jurusan Geografi FMIPA UI. Depok.
- Manning, Chris. (1996). *Urbanisasi, Pengganguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Melissa, Karina. (2007). *Perubahan Penggunaan Tanah di Sekitar Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tahun 1985, 1997 dan 2005 (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi)*. Skripsi Jurusan Geografi FMIPA UI. Depok.
- Montgomery, Mark. (2003). *Cities Transformed: Demographic Change and Its Implications in the Developing World Panel on Urban Population Dynamics*. Washington DC: National Academies Press.
- Muta'ali, Lutfi. (2002). Pola perkembangan Karakteristik Kotaan pada Desa-Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia, Volume 16 Nomor 2 September 2002, Hal. 111 – 130*.
- Pacione, Michael. (2001). *Urban Geography, a Global Perspective*. London: Routledge.
- Rahardjo, Sugeng. (2005). *Pengaruh Penggunaan Tanah terhadap Kualitas Hidup*. Disertasi Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta
- Soegijoko, Budhy *et all.* (2005). *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Buku I*. Jakarta: LPFE UI.
- Utama, Bey Sapta. (1994). Migrasi dan Pembangunan Daerah di Indonesia. *Warta Demografi No. 3, Hal 41 – 45*
- Widjopranoto, Rachmanto. (1983). *Urbanisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, Balai Penelitian Kesejahteraan Sosial.

Website :

Anonim. (2007). Menjadi Penyangga DKI, Sawah di Kabupaten Bekasi Merosot.

Pikiran Rakyat.Jakarta.

<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/052007/07/purwasuka/bekasiraya01.htm> diakses pada tanggal 14 Januari 2008 pukul 13.11 WIB

BPS. 2006. Pedoman Pencacah Sensus Ekonomi Tahun 2006.

www.columbia.edu/acis/eds/dgate/pdf/C1108-06.podes06_pedoman.pdf

diakses pada tanggal 24 Juli 2008 pukul 16.40 WIB

Firman, Tommy. 1996. Pola Spasial dan Restrukturisasi Perkotaan di Jawa.

<http://www.geocities.com/nuds2/artik.html>

diakses pada tanggal 2 Februari 2008 pukul 16.00 WIB

<http://www.innchannels.com/berita.php?id=2959>

diakses pada tanggal 14 Januari 2008 pukul 13.15 WIB

http://www.kab-bekasi.go.id/data.php?expG=1&html=m60_administrasi.html

diakses pada tanggal 15 Januari 2008 Pukul 12.35 WIB

<http://www.bps.go.id>

diakses pada tanggal 25 Januari 2008 Pukul 16.30 WIB

<http://www.geocities.com/nuds2/artik.html>

diakses pada tanggal 2 Februari 2008 Pukul 16.00 WIB

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=271702&kat_id=89

diakses pada tanggal 28 Februari 2008 Pukul 14.00 WIB

<http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view.html>

diakses pada tanggal 18 Maret 2008 Pukul 16.30 WIB

Lampiran 1. Tabel Status Wilayah dan Klasifikasi Kualitas Hidup di Kabupaten Bekasi Tahun 1996 dan 2006

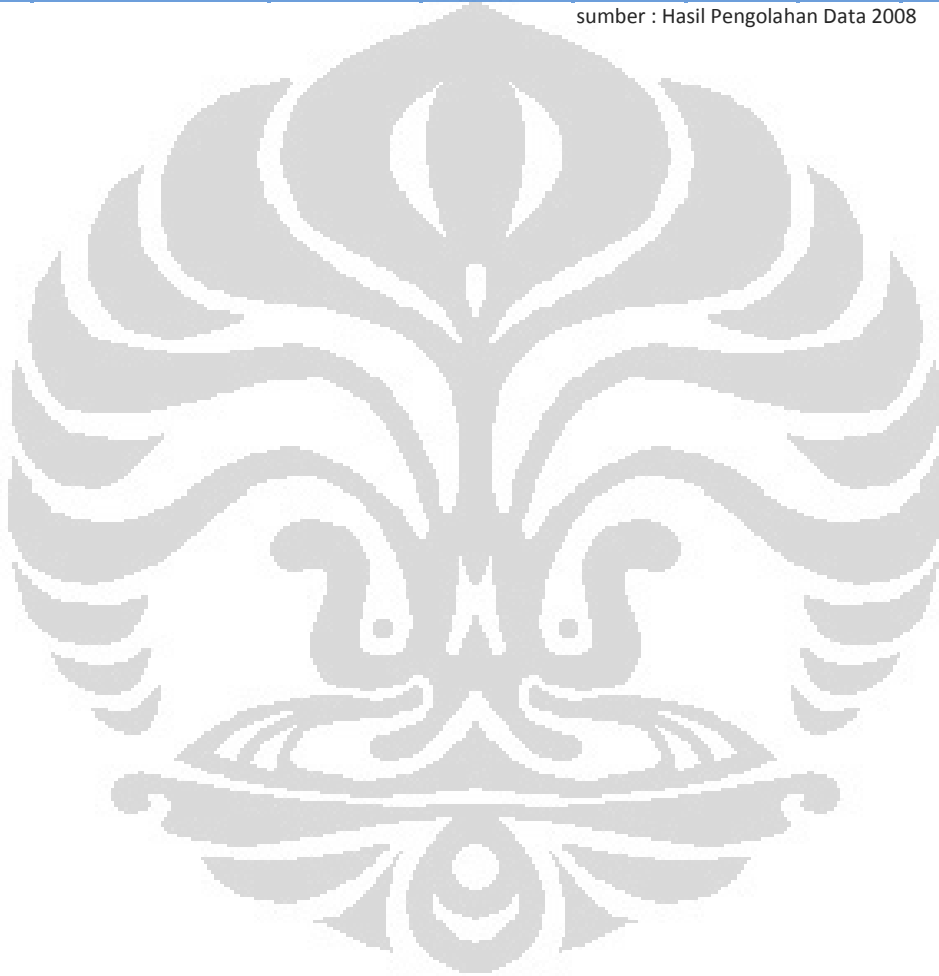
Kecamatan	Desa	Jaringan Jalan		Status Wilayah		Kualitas Hidup	
		Th 1996	Th 2006	Th 1996	Th 2006	Th 1996	Th 2006
BABELAN	BABELAN KOTA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Tinggi
BABELAN	BAHAGIA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Tinggi
BABELAN	BUNIBAKTI	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Rendah	Sedang
BABELAN	HURIPJAYA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Rendah	Rendah
BABELAN	KEBALEN	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Tinggi
BABELAN	KEDUNGGJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
BABELAN	KEDUNGPENGAWAS	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
BABELAN	MUARABAKTI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Rendah	Rendah
BABELAN	PANTAIHURIP	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Rendah	Rendah
BOJONGMANGU	BOJONGMANGU	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Sedang	Rendah
BOJONGMANGU	KARANGINDAH	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Rendah	Sedang
BOJONGMANGU	KARANGMULYA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Sedang	Sedang
BOJONGMANGU	MEDALKRISNA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Rendah	Sedang
BOJONGMANGU	SUKABUNGAH	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Sedang	Rendah
BOJONGMANGU	SUKAMUKTI	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Sedang	Rendah
CABANGBUNGIN	JAYABAKTI	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Rendah	Rendah
CABANGBUNGIN	JAYALAKSANA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
CABANGBUNGIN	LENGGAHJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Rendah	Sedang
CABANGBUNGIN	LENGGAHSARI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Rendah	Rendah
CABANGBUNGIN	SETIAJAYA	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Rendah	Rendah
CABANGBUNGIN	SETIALAKSANA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
CABANGBUNGIN	SINDANGJAYA	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Sedang
CABANGBUNGIN	SINDANGSARI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
CIBARUSAH	CIBARUSAHJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIBARUSAH	CIBARUSAHKOTA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIBARUSAH	RIDOGALIH	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Rendah	Sedang
CIBARUSAH	RIDOMANAH	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Rendah	Sedang
CIBARUSAH	SINDANGMULYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIBARUSAH	SIRNAJATI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIBARUSAH	WIBAWAMUKTI	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIBITUNG	CIBUNTU	Jalan Tol	Jalan Tol	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Tinggi
CIBITUNG	KERTAMUKTI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIBITUNG	MUKTIWARI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Sedang	Sedang
CIBITUNG	SARIMUKTI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Sedang	Sedang
CIBITUNG	SUKAJAYA	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIBITUNG	WANAJAYA	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIBITUNG	WANASARI	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG BARAT	CIKEDOKAN	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG BARAT	DANAUINDAH	Jalan Tol	Jalan Tol	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG BARAT	GANDAMEKAR	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG BARAT	GANDASARI	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG BARAT	JATIWANGI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
CIKARANG BARAT	KALIJAYA	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG BARAT	MEKARWANGI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG BARAT	SUKADANAU	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG BARAT	TELAGAASIH	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG BARAT	TELAJUNG	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG PUSAT	CICAU	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Sedang	Sedang
CIKARANG PUSAT	HEGARMUKTI	Jalan Tol	Jalan Tol	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG PUSAT	PASIRANJANG	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Sedang	Sedang
CIKARANG PUSAT	PASIRANJUNG	Jalan Tol	Jalan Tol	Rural	Sub Urban	Rendah	Sedang
CIKARANG PUSAT	SUKAMAHI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG SELATAN	CIANTRA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG SELATAN	CIBATU	Jalan Tol	Jalan Tol	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah

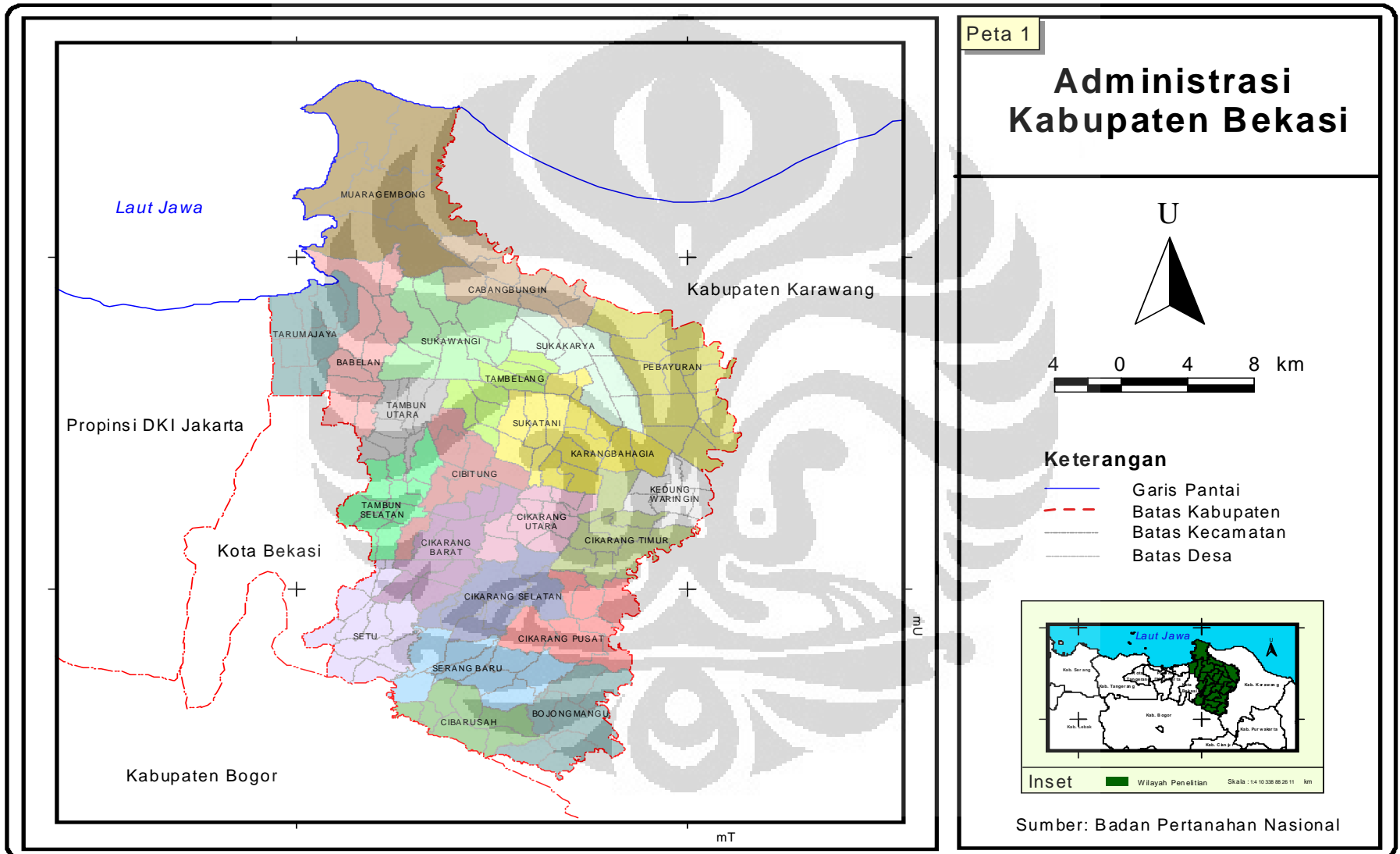
CIKARANG SELATAN	PASIRSARI	Jalan Tol	Jalan Tol	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG SELATAN	SERANG	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG SELATAN	SUKADAMI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG SELATAN	SUKARESMI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG SELATAN	SUKASEJATI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Sedang	Sedang
CIKARANG TIMUR	CIPAYUNG	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
CIKARANG TIMUR	HEGARMANAH	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG TIMUR	JATIBARU	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
CIKARANG TIMUR	JATIREJA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG TIMUR	KARANGSARI	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Rural	Sub Urban	Rendah	Rendah
CIKARANG TIMUR	LABANSARI	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG TIMUR	SETRAJAYA	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG TIMUR	TANJUNGBARU	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
CIKARANG UTARA	CIKARANG KOTA	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Urban	Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG UTARA	HARJAMEKAR	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG UTARA	KARANGASIH	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Urban	Urban	Sedang	Tinggi
CIKARANG UTARA	KARANGBARU	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG UTARA	KARANGRAHARJA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
CIKARANG UTARA	MEKARMUkti	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG UTARA	PASIRGOMBONG	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG UTARA	SIMPANGAN	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG UTARA	TANJUNGSARI	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
CIKARANG UTARA	WALUYA	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
CIKARANG UTARA	WANGUNHARJA	Jalan Tol	Jalan Tol	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
KARANGBAHAGIA	KARANGANYAR	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
KARANGBAHAGIA	KARANGBAHAGIA	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Rendah
KARANGBAHAGIA	KARANGMUKTI	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
KARANGBAHAGIA	KARANGRAHAYU	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Sedang
KARANGBAHAGIA	KARANGSATU	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
KARANGBAHAGIA	KARANGSENTOSA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
KARANGBAHAGIA	KARANGSETIA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Sedang
KARANGBAHAGIA	SUKARAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
KEDUNGWARINGIN	BOJONGSARI	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
KEDUNGWARINGIN	KARANGHARUM	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
KEDUNGWARINGIN	KARANGMEKAR	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Rendah	Rendah
KEDUNGWARINGIN	KARANGSAMBUNG	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
KEDUNGWARINGIN	KEDUNGWARINGIN	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
KEDUNGWARINGIN	MEKARJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
KEDUNGWARINGIN	WARINGINJAYA	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
MUARAGEMBONG	JAYASAKTI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Rendah	Rendah
MUARAGEMBONG	PANTAIBAHAGIA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Sub Urban	Rendah	Sedang
MUARAGEMBONG	PANTAIBAKTI	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
MUARAGEMBONG	PANTAIHARAPANJAYA	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Rendah
MUARAGEMBONG	PANTAIMEKAR	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
MUARAGEMBONG	PANTAISEDERHANA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Rendah	Rendah
PEBAYURAN	BANTARJAYA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
PEBAYURAN	BANTARSARI	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Rendah	Rendah
PEBAYURAN	KARANGHARJA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Rendah
PEBAYURAN	KARANGHAUR	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
PEBAYURAN	KARANGJAYA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Sub Urban	Rendah	Rendah
PEBAYURAN	KARANGPATRI	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Rendah	Rendah
PEBAYURAN	KARANGREJA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Rendah
PEBAYURAN	KARANGSEGAR	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Sedang	Sedang
PEBAYURAN	KERTAJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
PEBAYURAN	KERTASARI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
PEBAYURAN	SUMBEREJA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Rendah	Sedang
PEBAYURAN	SUMBERSARI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
PEBAYURAN	SUMBERURIP	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
SERANG BARU	CILANGKARA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Rendah	Sedang

SERANG BARU	JAYAMULYA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
SERANG BARU	JAYASAMPURNA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Sedang	Sedang
SERANG BARU	NAGACIPTA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Sedang	Rendah
SERANG BARU	NAGASARI	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Sedang	Sedang
SERANG BARU	SIRNAJAYA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Sub Urban	Rendah	Rendah
SERANG BARU	SUKARAGAM	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
SERANG BARU	SUKASARI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Tinggi
SETU	BURANGKENG	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
SETU	CIBENING	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
SETU	CIJENGKOL	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
SETU	CIKARAGEMAN	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
SETU	CILEDUG	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
SETU	KERTARAHAYU	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Rural	Sedang	Sedang
SETU	LUBNAGBUAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Sedang
SETU	MUKTIJAYA	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
SETU	RAGEMANUNGGAL	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
SETU	TAMANRAHAYU	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
SETU	TAMANSARI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
SUKAKARYA	SUKAINDAH	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Rendah
SUKAKARYA	SUKAJADI	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
SUKAKARYA	SUKAKARSA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Rendah	Rendah
SUKAKARYA	SUKAKARYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Sedang	Sedang
SUKAKARYA	SUKALAKSANA	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Sedang	Rendah
SUKAKARYA	SUKAMAKMUR	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
SUKAKARYA	SUKAMURNI	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Rural	Sub Urban	Sedang	Rendah
SUKATANI	BANJARSARI	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
SUKATANI	SUKAASIH	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
SUKATANI	SUKADHARMA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
SUKATANI	SUKAHURIP	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Sedang	Rendah
SUKATANI	SUKAMANAH	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
SUKATANI	SUKAMULYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
SUKATANI	SUKARUKUN	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
SUKAWANGI	SUKABUDI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Rendah
SUKAWANGI	SUKADAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Sedang	Rendah
SUKAWANGI	SUKAKERTA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Rendah
SUKAWANGI	SUKAMEKAR	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Sedang	Rendah
SUKAWANGI	SUKARINGIN	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Sedang	Rendah
SUKAWANGI	SUKATENANG	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
SUKAWANGI	SUKAWANGI	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
TAMBELANG	SUKABAKTI	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Rendah	Rendah
TAMBELANG	SUKAMAJU	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Rendah	Rendah
TAMBELANG	SUKAMANTRI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Rendah	Rendah
TAMBELANG	SUKARAHAYU	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Rendah
TAMBELANG	SUKARAJA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Rendah
TAMBELANG	SUKARAPIH	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Rendah
TAMBELANG	SUKAWIJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Rendah	Rendah
TAMBUN SELATAN	JATIMULYA	Jalan Tol	Jalan Tol	Urban	Urban	Sedang	Tinggi
TAMBUN SELATAN	LAMBANGJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
TAMBUN SELATAN	LAMBANGSARI	Jalan Tol	Jalan Tol	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
TAMBUN SELATAN	MANGUNJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Urban	Sedang	Tinggi
TAMBUN SELATAN	MEKARSARI	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Urban	Urban	Sedang	Sedang
TAMBUN SELATAN	SETIADARMA	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Urban	Urban	Sedang	Sedang
TAMBUN SELATAN	SETIAMEKAR	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Urban	Urban	Tinggi	Tinggi
TAMBUN SELATAN	SUMBERJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Urban	Sedang	Tinggi
TAMBUN SELATAN	TAMBUN	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Sub Urban	Urban	Sedang	Tinggi
TAMBUN SELATAN	TRIDAYASAKTI	Jalan Lokal	Jalan Kolektor	Sub Urban	Urban	Sedang	Tinggi
TAMBUN UTARA	JEJALENJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Sedang
TAMBUN UTARA	KARANGSATRIA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Urban	Sedang	Sedang
TAMBUN UTARA	SATRIAJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang

TAMBUN UTARA	SATRIAMEKAR	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
TAMBUN UTARA	SRIAMUR	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
TAMBUN UTARA	SRIJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
TAMBUN UTARA	SRIMAHI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Sedang
TAMBUN UTARA	SRIMUKTI	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Sedang
TARUMAJAYA	PAHLAWANSETIA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Sedang
TARUMAJAYA	PANTAIMAKMUR	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Rendah	Sedang
TARUMAJAYA	PUSAKARAKYAT	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
TARUMAJAYA	SAMUDRAJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Rural	Sedang	Sedang
TARUMAJAYA	SEGARAJAYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
TARUMAJAYA	SEGARAMAKMUR	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Sedang	Sedang
TARUMAJAYA	SETIAASIH	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Sub Urban	Sub Urban	Sedang	Tinggi
TARUMAJAYA	SETIAMULYA	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor	Rural	Sub Urban	Rendah	Rendah

sumber : Hasil Pengolahan Data 2008



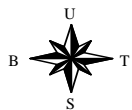
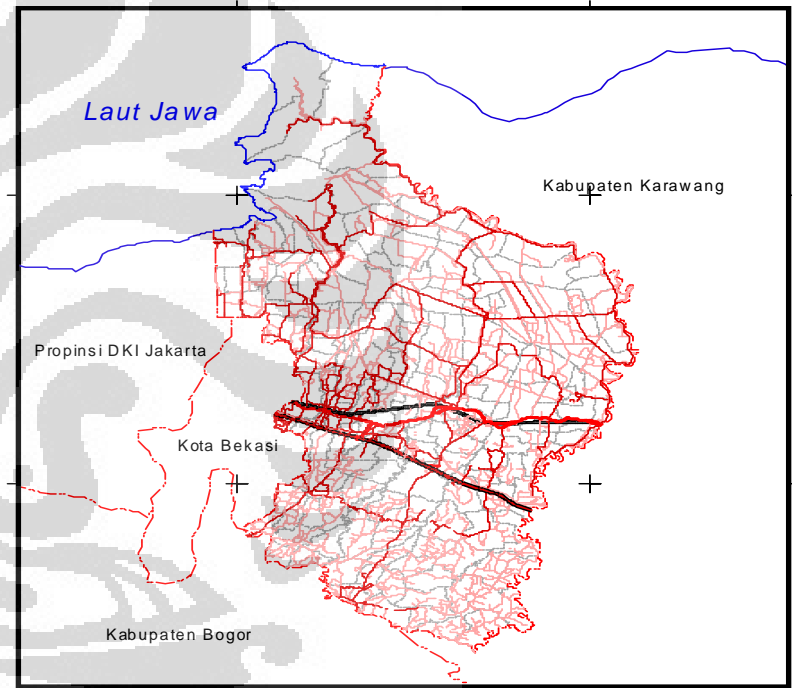
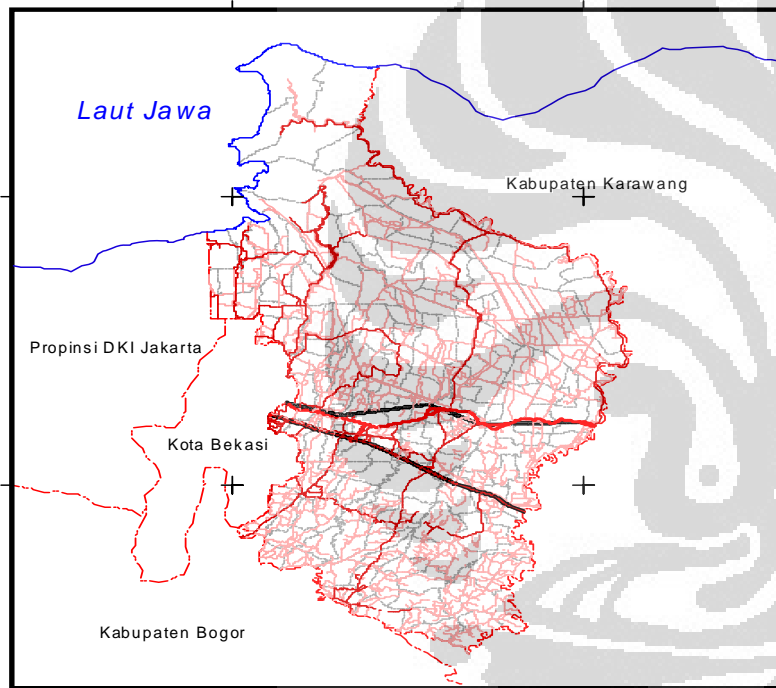


Peta 2

Jaringan Jalan di Kabupaten Bekasi

Tahun 1996

Tahun 2006



Skala :
4 0 4 8 km

Batas Administrasi

- (Blue line) Garis Pantai
- - - (Red dashed line) Batas Kabupaten
- (Grey line) Batas Desa

Jaringan Jalan

- (Thick red line) Jalan Tol
- (Red line) Jalan Arteri
- (Thin red line) Jalan Kolektor
- (Light red line) Jalan Lokal
- (Dark line) Rel Kereta Api



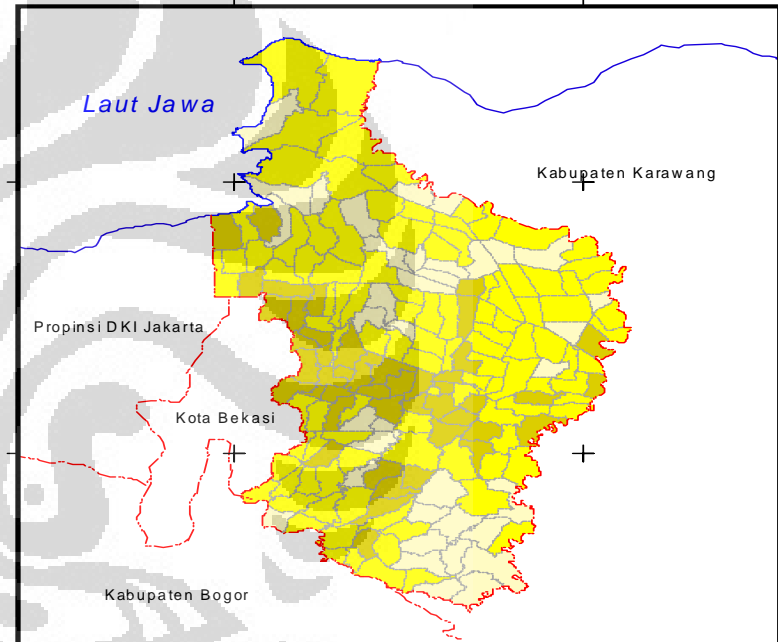
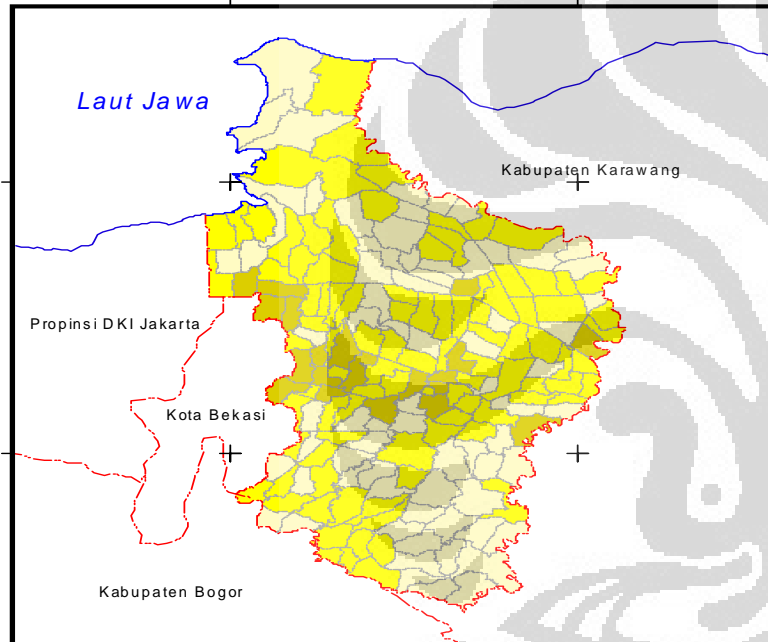
Sumber :
Hasil Pengolahan Data 2008

Peta 3

Jumlah Penduduk di Kabupaten Bekasi

Tahun 1996

Tahun 2006



Skala :
4 0 4 8 km

Batas Administrasi

- (blue) — Garis Pantai
- - - (red) - - - Batas Kabupaten
- (grey) — Batas Desa

Klasifikasi

- (light yellow) Rendah
- (medium yellow) Sedang
- (dark yellow) Tinggi



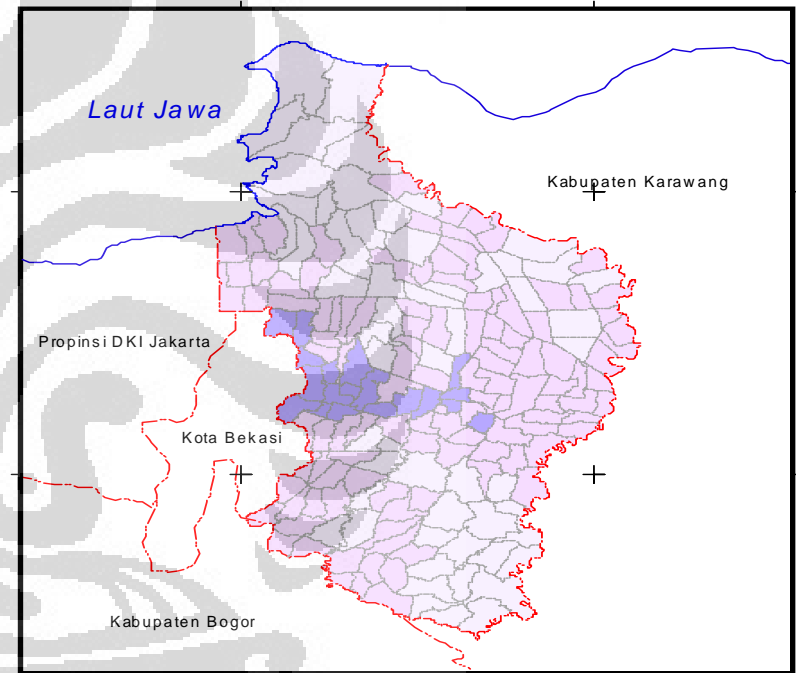
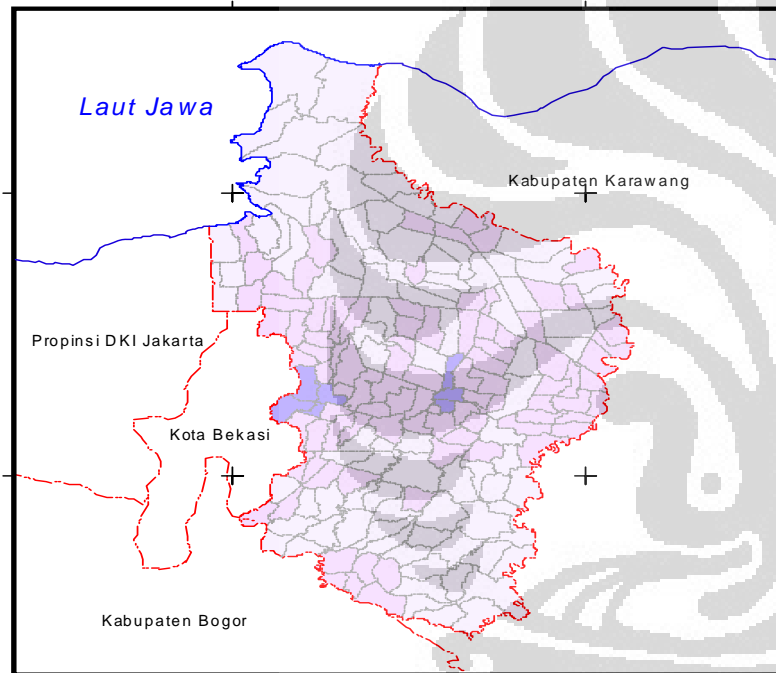
Sumber :
Hasil Pengolahan Data 2008

Peta 4

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bekasi

Tahun 1996

Tahun 2006



Skala :
4 0 4 8 km

Batas Administrasi

- Garis Pantai
- - - Batas Kabupaten
- Batas Desa

Klasifikasi

- Rendah
- Sedang
- Tinggi



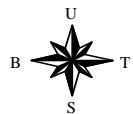
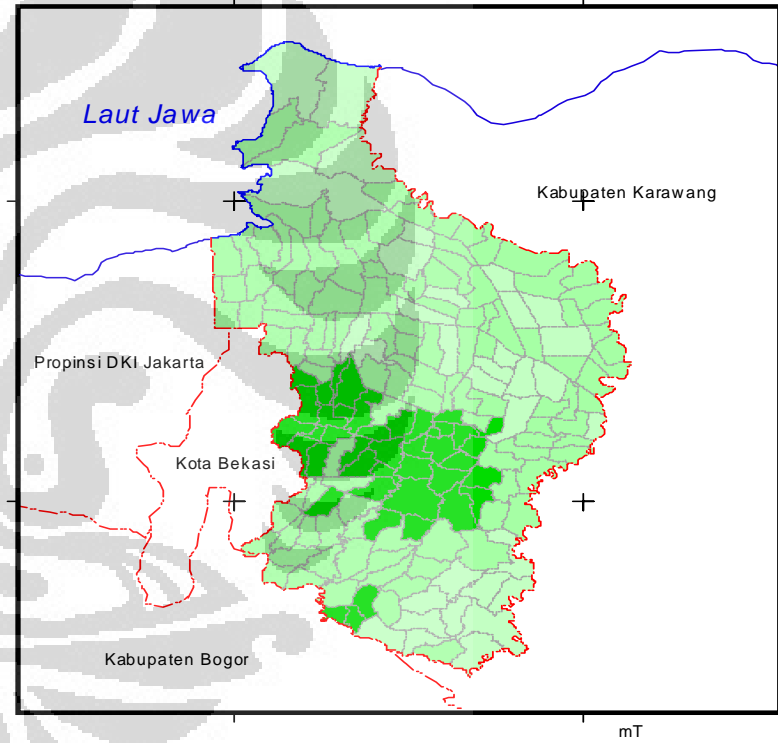
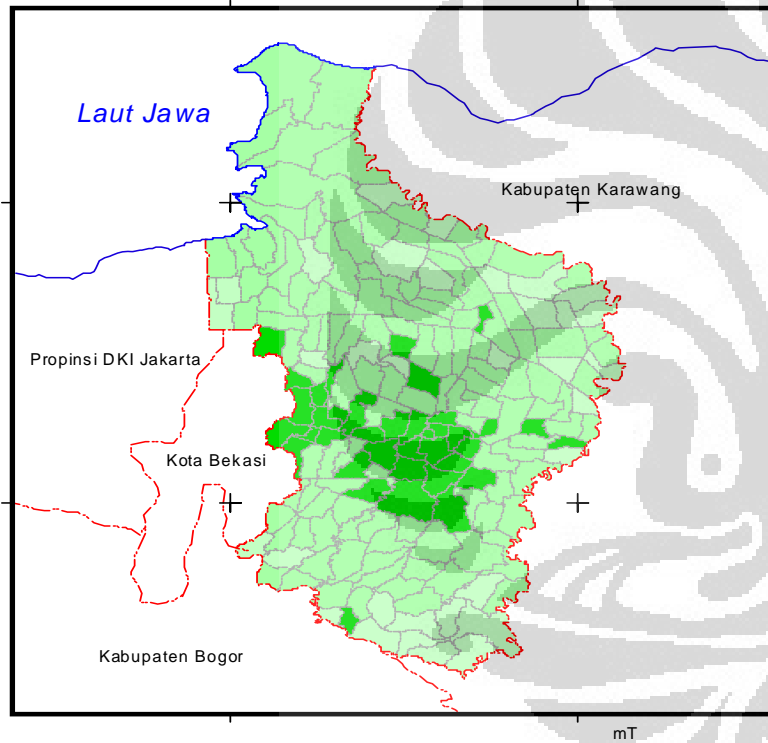
Sumber :
Hasil Pengolahan Data 2008

Peta 5

Persentase Keluarga Non Agraris di Kabupaten Bekasi

Tahun 1996

Tahun 2006



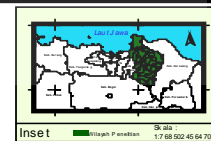
Skala :
4 0 4 8 km

Batas Administrasi

- (blue line) Garis Pantai
- - - (red dashed line) Batas Kabupaten
- (black solid line) Batas Desa

Klasifikasi

- Light Green: Rendah
- Medium Green: Sedang
- Dark Green: Tinggi



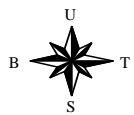
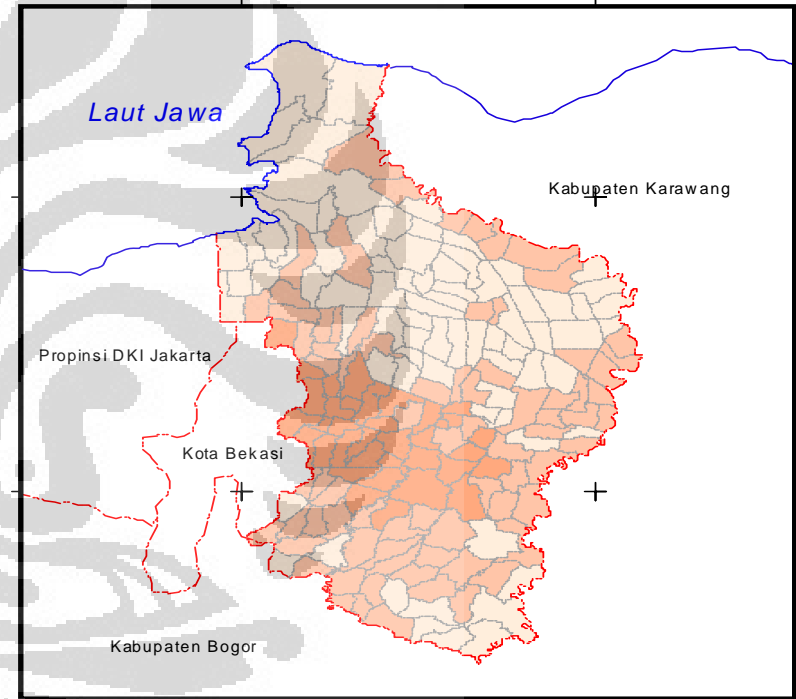
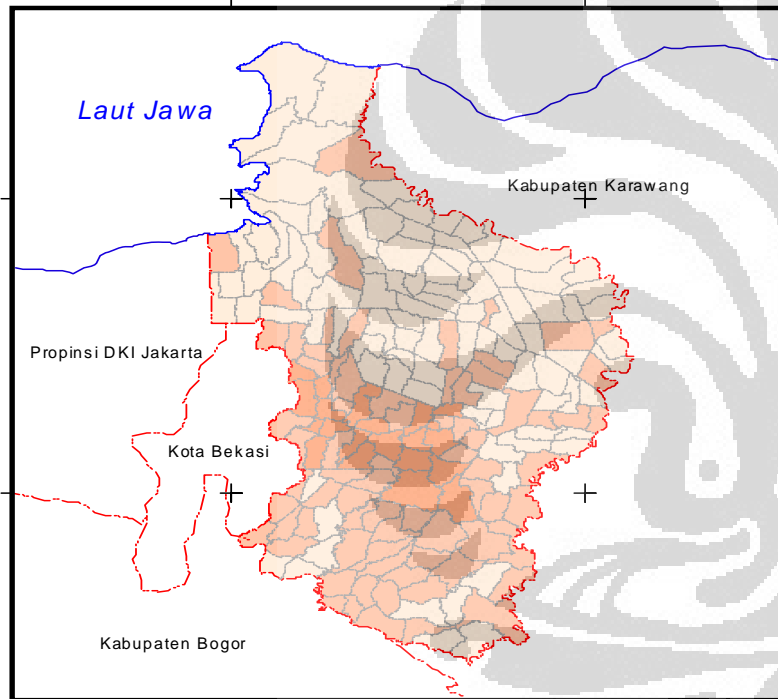
Sumber :
Hasil Pengolahan Data 2008

Peta 6

Lahan Terbangun di Kabupaten Bekasi

Tahun 1996

Tahun 2006




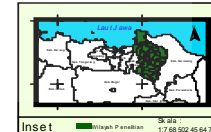
Skala :
4 0 4 8 km

Batas Administrasi

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Desa

Klasifikasi

-  Rendah
-  Sedang
-  Tinggi



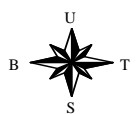
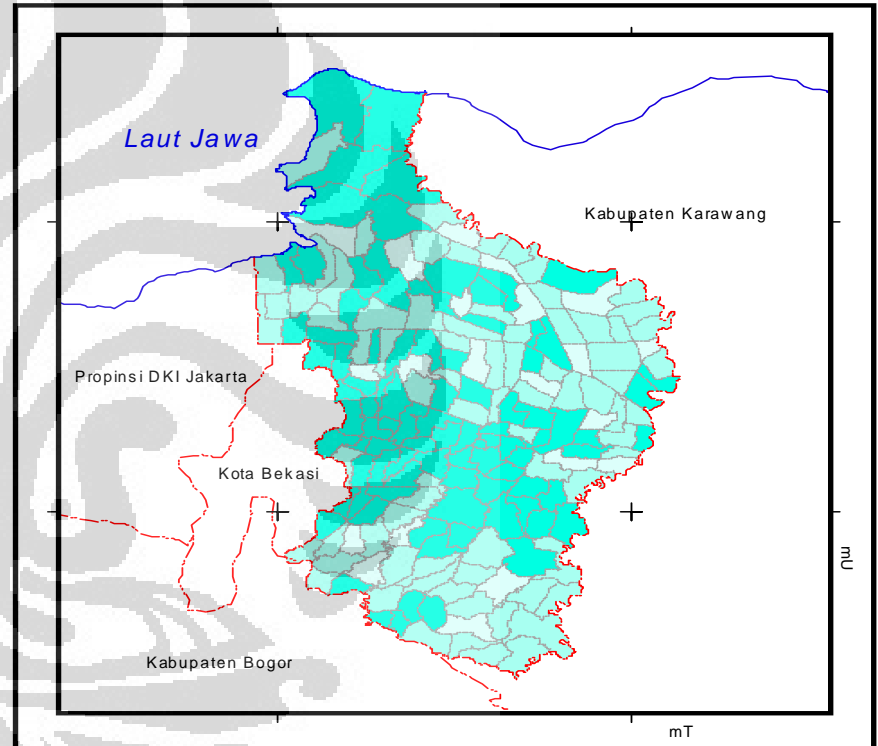
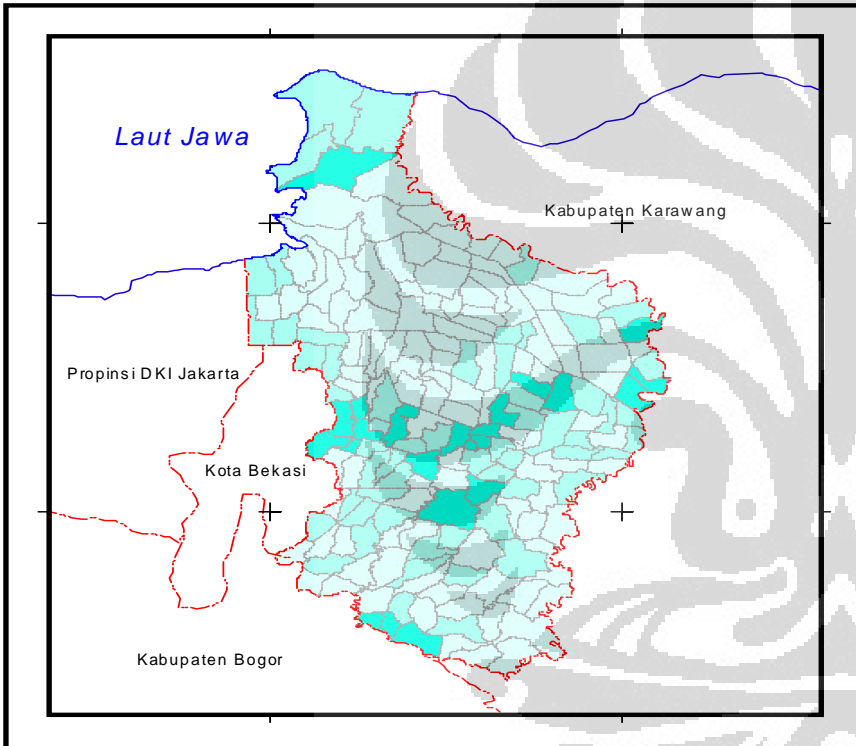
Sumber :
Hasil Pengolahan Data 2008

Peta 7

Jumlah Fasilitas Sosial Ekonomi di Kabupaten Bekasi

Tahun 1996

Tahun 2006



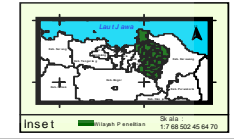
Skala :
4 0 4 8 km

Batas Administrasi

- Garis Pantai
- - - Batas Kabupaten
- Batas Desa

Klasifikasi

- Light Green: Rendah
- Medium Green: Sedang
- Dark Green: Tinggi

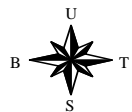
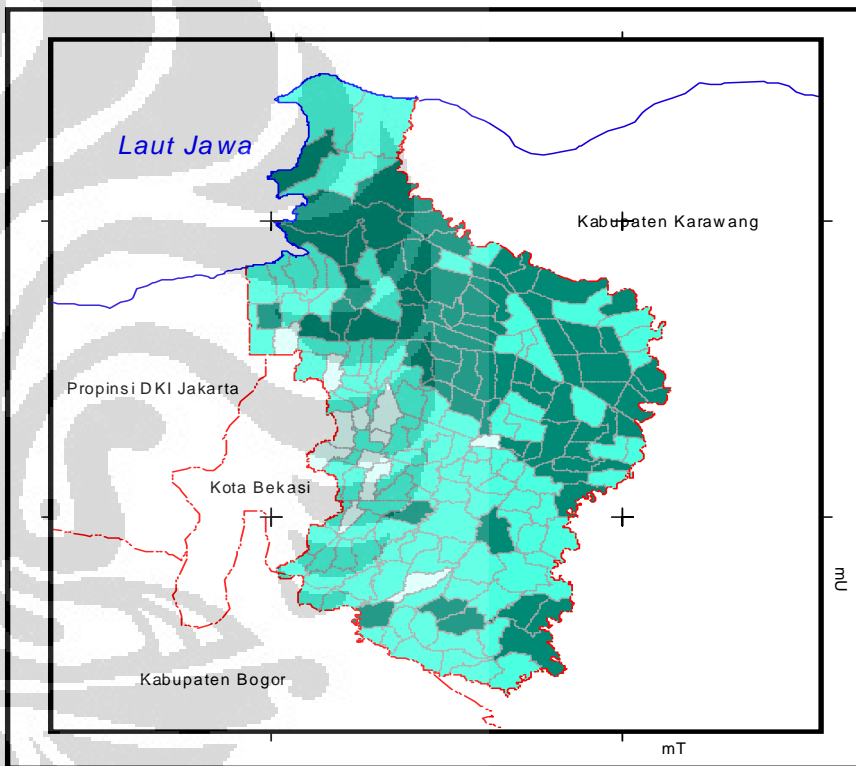
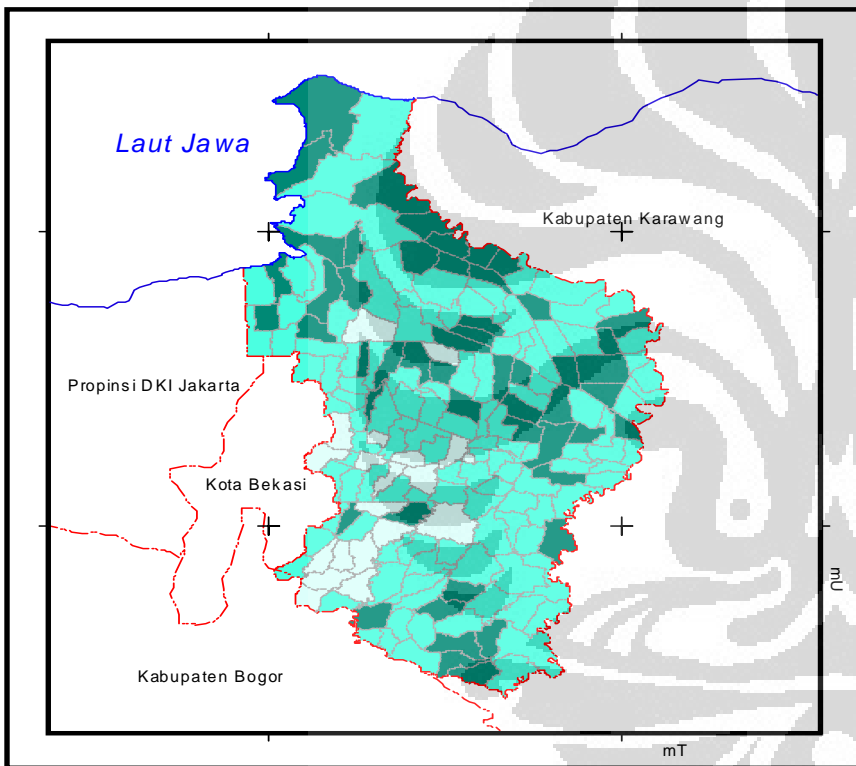


Sumber :
Hasil Pengolahan Data 2008

Persentase Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Bekasi

Tahun 1996

Tahun 2006



Skala :
4 0 4 8 km

Batas Administrasi

- Garis Pantai
- - - Batas Kabupaten
- Batas Desa

Klasifikasi

- Rendah
- Sedang
- Tinggi



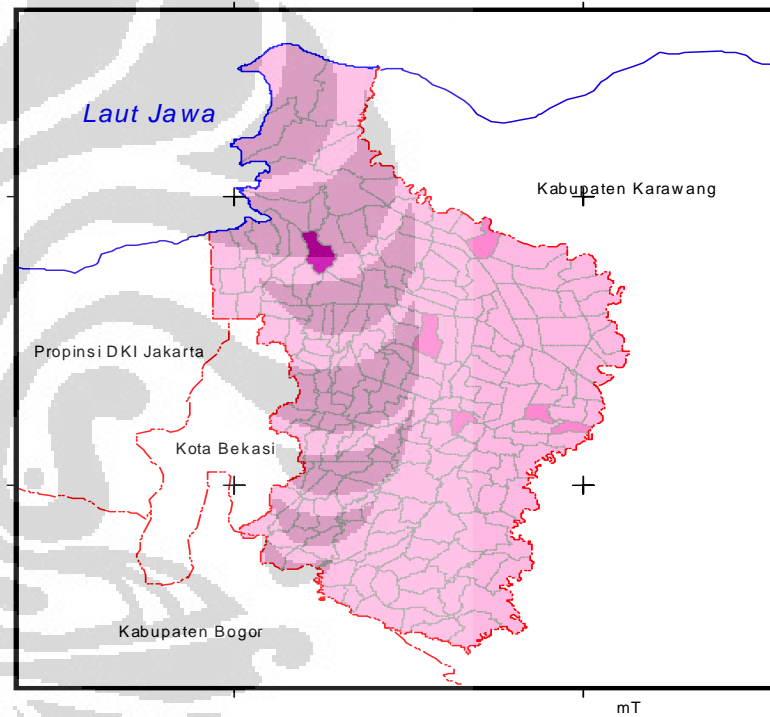
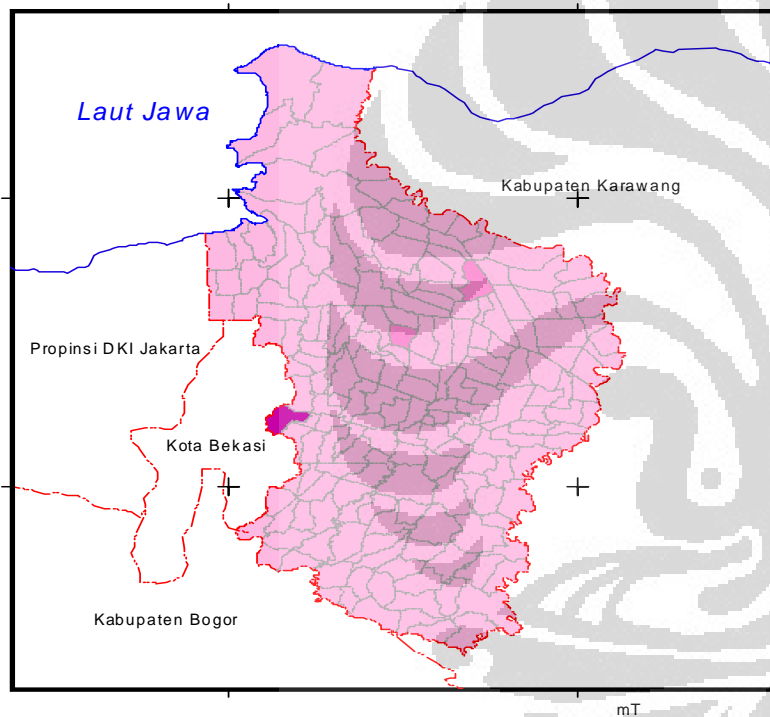
Sumber :
Hasil Pengolahan Data 2008

Peta 9

Persentase Keluarga yang Tinggal di Permukiman Kumuh pada Kabupaten Bekasi

Tahun 1996

Tahun 2006



Skala :
4 0 4 8 km

Batas Administrasi

- (blue line) Garis Pantai
- - - (red dashed line) Batas Kabupaten
- (grey dashed line) Batas Desa

Klasifikasi

- (light pink box) Rendah
- (medium pink box) Sedang
- (dark pink box) Tinggi



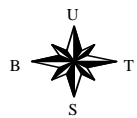
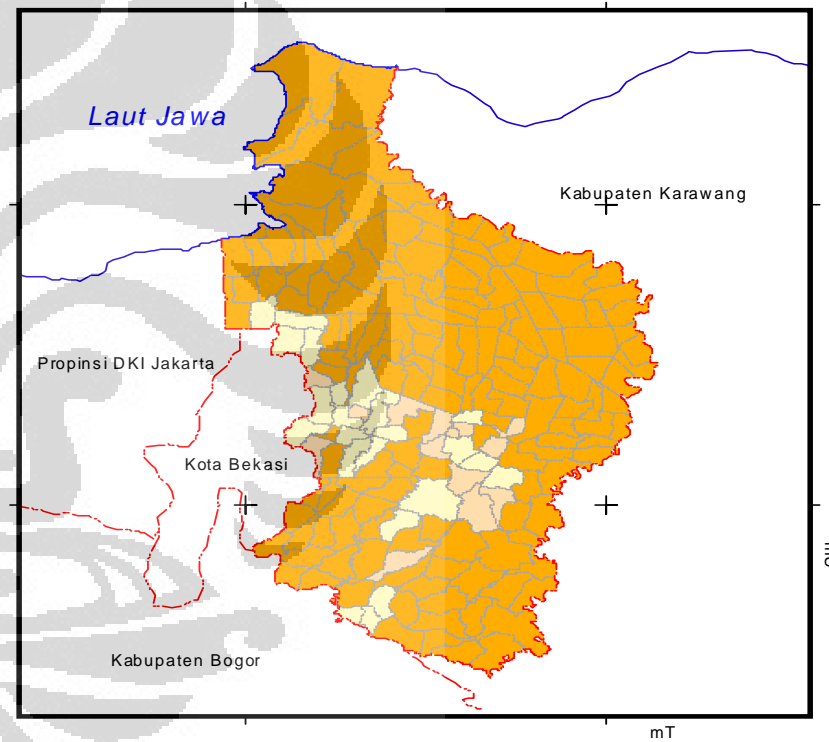
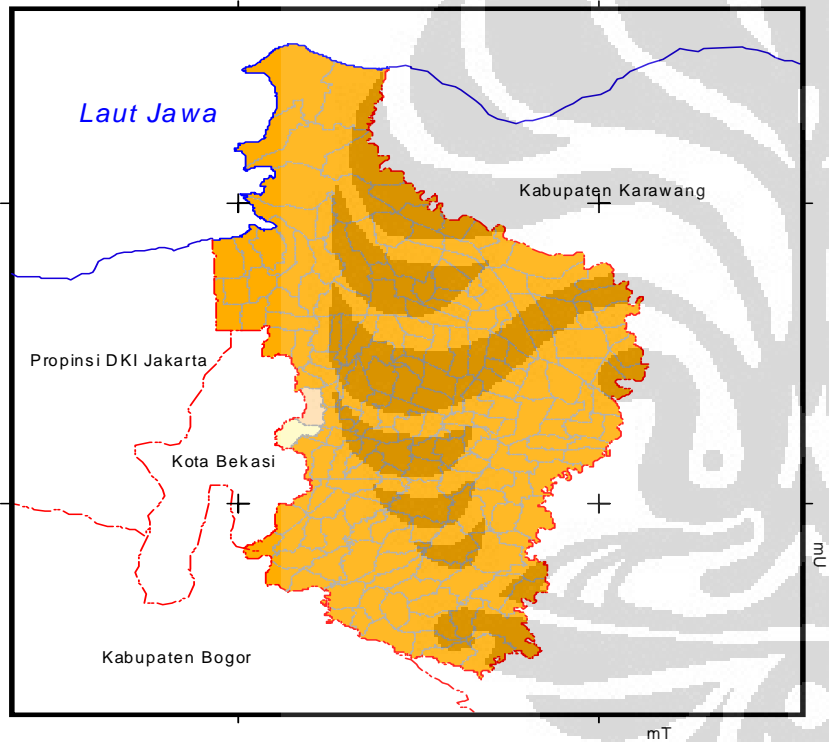
Sumber :
Hasil Pengolahan Data 2008

Peta 10

Persentase Keluarga yang Tidak Mempunyai Telepon di Kabupaten Bekasi

Tahun 1996

Tahun 2006



Skala :
4 0 4 8 km

Batas Administrasi

- Garis Pantai
- - - Batas Kabupaten
- Batas Desa

Klasifikasi

- Rendah
- Sedang
- Tinggi

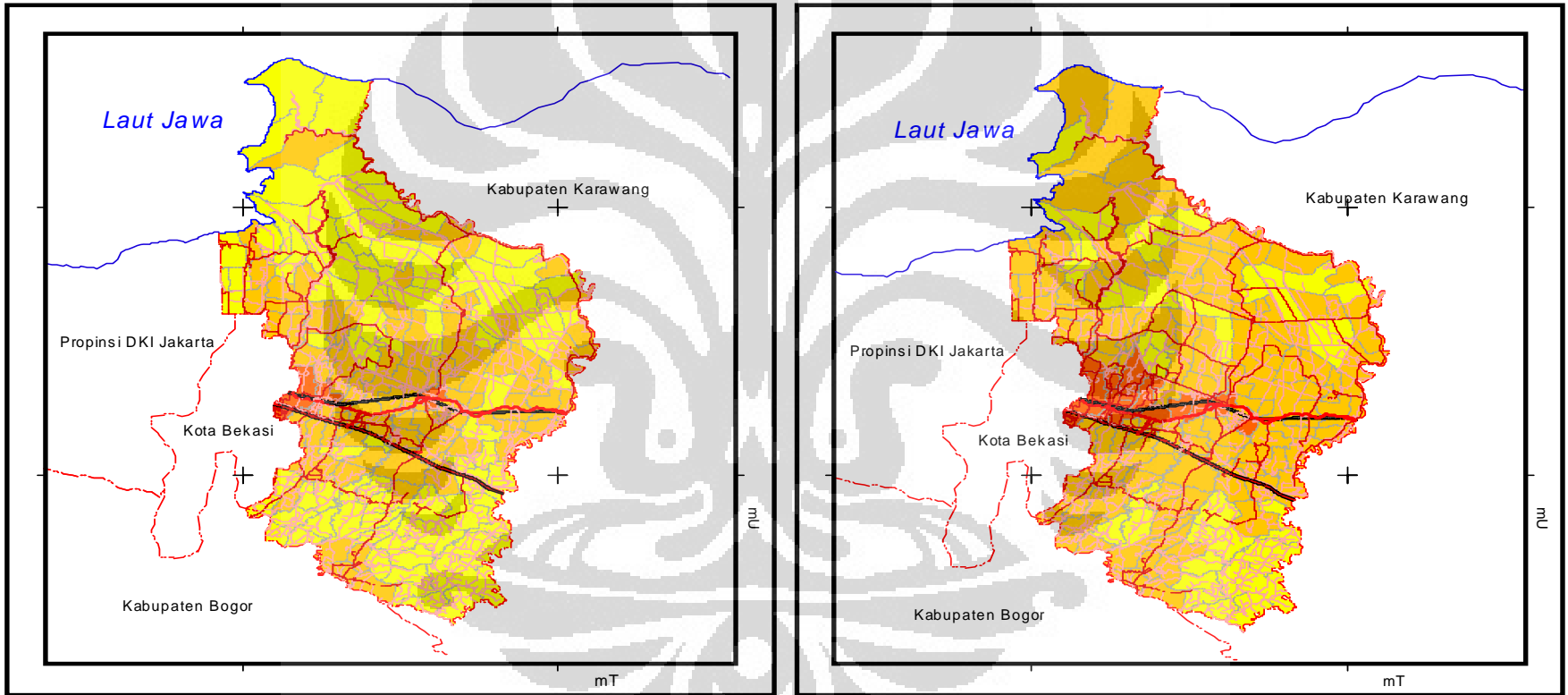


Sumber :
Hasil Pengolahan Data 2008

Status Wilayah di Kabupaten Bekasi

Tahun 1996

Tahun 2006



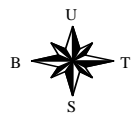
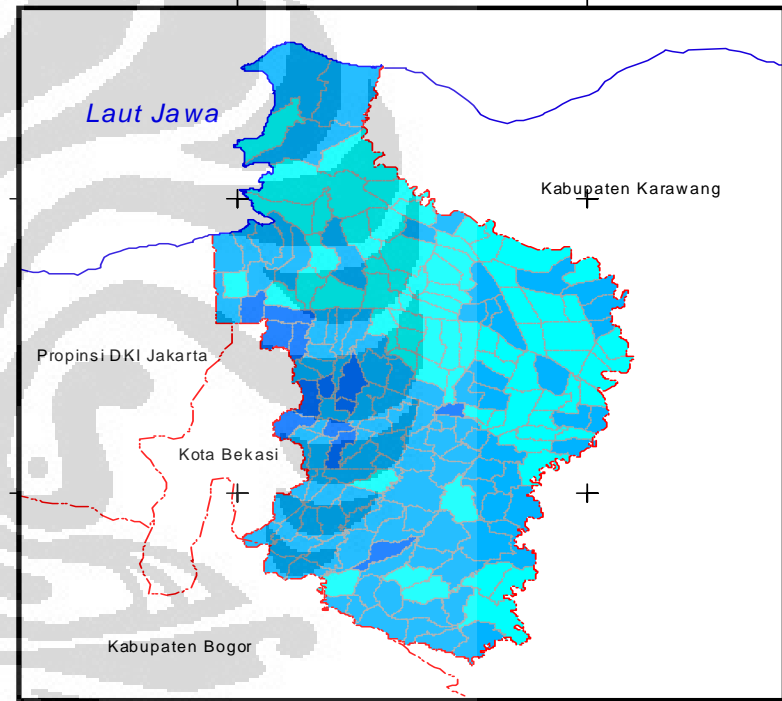
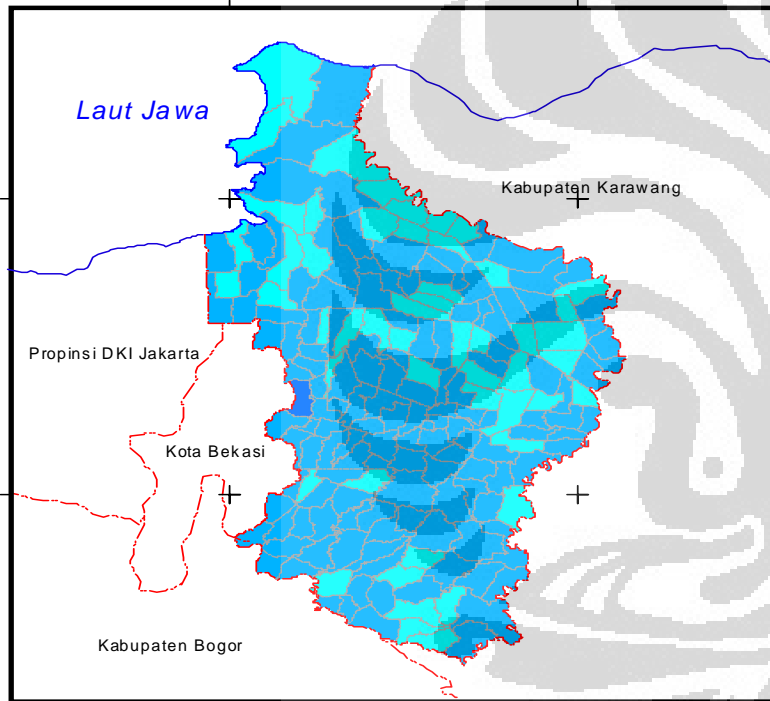
	Batas Administrasi ———— Garis Pantai - - - - Batas Kabupaten ———— Batas Desa	Jaringan Jalan ———— Jalan Tol ———— Jalan Arteri ———— Jalan Kolektor ———— Jalan Lokal ———— Rel Kereta Api	Klasifikasi ■ Rural ■ Sub Urban ■ Urban	Inset R. 49 1,7 68 502 45 64 70	Skala : 4 0 4 8 km Sumber : Hasil Pengolahan Data 2008
--	--	--	---	---------------------------------------	---

Peta 12

Kualitas Hidup di Kabupaten Bekasi

Tahun 1996

Tahun 2006



Skala :
4 0 4 8 km

Batas Administrasi

- Garis Pantai
- - - Batas Kabupaten
- Batas Desa

Klasifikasi

- Rendah
- Sedang
- Tinggi



Sumber :
Hasil Pengolahan Data 2008



Foto 1. Penggunaan Tanah Persawahan di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek



Foto 2. Pintu Tol menuju Kota Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat



Foto 3. Ladang di Tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek



Foto 8. Jalan Raya Kalimalang, Jatimulya. Salah satu jalan kolektor di Kabupaten Bekasi



Foto 9. Salah satu perusahaan industri di tepi jalan kolektor



Foto 10. Kawasan permukiman kumuh di tepi jalan kolektor



Foto 11. Salah satu Jalan Lokal di Kabupaten Bekasi



Foto 12. Ladang di tepi jalan lokal



Foto 13. Tipe permukiman di sepanjang jalan lokal



Foto 4. Jalan Teuku Umar, Cibitung. Salah satu jalan arteri di Kabupaten Bekasi



Foto 5. Terminal Angkutan Kota dan Pasar Cikarang Kota



Foto 6. Salah satu Perusahaan Industri di Jaringan Jalan Arteri



Foto 7. Pasar Tambun, terletak di sisi jalan arteri